



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan. Gedongkuning Nomor. 146 Yogyakarta 55171
Telepon (0274) 378431, Faksimili (0274) 378432
Laman: jogja.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwiljogja@kemenkum.go.id

Nomor : W14.PW.03.04-4096 23 Juni 2025
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : **Laporan Penyelenggaraan SPIP
Triwulan II Tahun 2025**

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, dengan ini kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan SPIP pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan II Tahun 2025, dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1. Kemajuan Penyelenggaraan SPIP

Realisasi kemajuan penyelenggaraan SPIP sampai dengan triwulan II Tahun 2025 mencapai 49,23% dari target pada tahun 2025. Capaian ini disebabkan :

a. Hal positif yang mendukung pencapaian tersebut adalah

- Pada tahap persiapan yang meliputi kegiatan pemahaman (*knowing*), diantaranya :
 1. Disusun tim penyelenggara SPIP dan dituangkan dalam SK Kepala Kantor Wilayah Nomor W.14-465.PW.02.03 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta serta rencana kerja yang diawali dengan rapat penyusunan tim;
 2. Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ;
- Pada tahap penyusunan Rencana Penyelenggaraan telah dilaksanakan Rapat mitigasi risiko Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko oleh Tim penyusun dan UPR pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Januari 2025.

Hasil yang dicapai

Adanya pemahaman yang sama dalam menyusun dokumen manajemen risiko Kantor Wilayah dengan berpedoman pada Permenkum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum. Dalam penetapan tujuan didasarkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025, serta memperhatikan isu penting saat ini.

Dokumen MR yang disusun memperhatikan terkait penegakan nilai integritas, pencegahan pungli dan gratifikasi dalam pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa dan proses rekrutmen pegawai. Risiko terkait kebakaran dan bencana alam juga masuk dalam daftar risiko yang perlu mendapat perhatian pimpinan.

- Pada tahap pelaksanaan, Kantor Wilayah Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan mitigasi resiko pada masing-masing proses bisnis dan pelaksanaan tusi dan dituangkan dalam matriks manajemen risiko. Adanya identifikasi tersebut, memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pengendalian intern karena telah disusun analisis, evaluasi, penanganan serta pemantauan risiko.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan penyelenggaraan pengendalian dikaitkan dengan unsur-unsur yang ada dalam SPIP.

Hasil yang dicapai :

1. **Penguatan Tata Kelola Administrasi (Unsur SPIP: Lingkungan Pengendalian)**
 - ✓ Dilaksanakannya **Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja.
 - ✓ Peningkatan kapasitas SDM melalui **Pelatihan Manajemen Arsip Digital** guna mendukung efektivitas pengelolaan dokumen.
2. **Optimalisasi Pelayanan Publik (Unsur SPIP: Aktivitas Pengendalian)**
 - ✓ Implementasi **aplikasi SIMPEL (Sistem Informasi Pelayanan Elektronik)** untuk mempercepat proses administrasi surat-menurut dan permohonan layanan.
 - ✓ Revitalisasi **helpdesk online** guna meningkatkan respon terhadap keluhan masyarakat.
3. **Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat (Unsur SPIP: Komunikasi dan Informasi)**
 - ✓ Kegiatan "**Hukum Goes to Campus**" di UGM dan UNY, menyosialisasikan

UU ITE dan Hak Kekayaan Intelektual kepada mahasiswa.

- ✓ Webinar "Perlindungan Hukum bagi UMKM" bersama Dinas Koperasi DIY, diikuti 300 peserta.

4. Layanan Bantuan Hukum Gratis (Unsur SPIP: Penilaian Risiko)

- ✓ Peningkatan jumlah penerima bantuan hukum mencapai **150 orang** dengan fokus pada kelompok rentan (perempuan, disabilitas, dan anak).
- ✓ Pemantauan dan evaluasi **kualitas advokat mitra** untuk memastikan standar layanan terpenuhi.

5. 1. Harmonisasi Perda DIY (Unsur SPIP: Pemantauan)

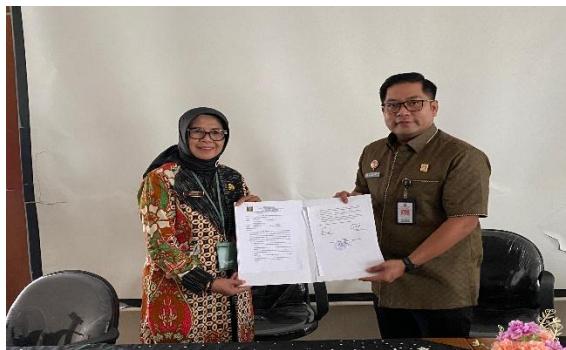
- ✓ **Kemenkum DIY Kawal Harmonisasi Raperwal Pola Karier PNS Kota Yogyakarta** (Kegiatan pengharmonisasian ini merupakan tindak lanjut atas undangan dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkum DIY dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari BKPSDM Kota Yogyakarta selaku pemrakarsa Raperwal.)



- ✓ **Kemenkum DIY Fasilitasi Penyusunan Raperda RPJMD Gunungkidul 2025-2029, Perkuat Sinergi Pembangunan Berkeadilan** (Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan daerah dengan memfasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Fasilitasi ini bertujuan untuk memastikan terciptanya regulasi yang berkeadilan, inklusif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat Gunungkidul).



- ✓ Kementerian Hukum DIY Fasilitasi Penyusunan Raperbup **Gunungkidul untuk Pengelolaan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan** (Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY mengambil peran aktif dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Gunungkidul. Kali ini, Kemenkum DIY memfasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Gunungkidul tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) pada Satuan Pendidikan Kesetaraan).



- ✓ Dilakukan uji materi terhadap 3 Perda DIY terkait keselarasan dengan peraturan pusat.
- ✓ FGD "Sinergi Hukum Pusat-Daerah" bersama DPRD DIY untuk meminimalisir tumpang tindih regulasi.

6. Pembinaan Aparatur Hukum Daerah (Unsur SPIP: Pengendalian Aktivitas)

- ✓ Pelatihan "Teknik Penyusunan Naskah Akademik" bagi 50 ASN Pemda DIY.
- ✓ Penyusunan **database peraturan desa** berbasis online untuk memudahkan akses dan evaluasi.

➤ Pada tahap pengembangan berkelanjutan, dimaksudkan untuk mendukung kemajuan penyelenggaraan SPIP, yaitu dengan dilaksanakannya rapat evaluasi pada setiap bulan, serta penyusunan Laporan Triwulan.

b. Kendala penyelenggaraan SPIP pada Kanwil Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu :

1. Kurangnya pemahaman menyeluruh terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ;
2. Kurangnya dukungan Satgas SPIP dalam penyelenggaraan SPIP yang dapat menjangkau seluruh unit kerja pemilik risiko;
3. Masih terbatasnya saran prasarana termasuk dukungan penyedia teknologi informasi untuk peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP;
4. Terdapat kendala dan keterbatasan Kanwil serta UPT dalam pemenuhan

kriteria penilaian maturitas SPIP, diantaranya terkait dokumen, wawancara dan observasi;

2. Rencana Tindak pada Triwulan Selanjutnya

Atas capaian tersebut, rencana tindak pada Triwulan III Tahun 2025 adalah:

- a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi/FGD/Workshop dengan narasumber dari Inspektorat Jenderal ataupun dari BPKP Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Melaksanakan rapat seluruh satgas SPIP untuk menunjang penyelenggaraan Pengendalian Internal yang dapat menjangkau seluruh unit kerja pemilik risiko;
- c. Menyusun daftar kebutuhan Sarpras dan mengajukan pada Biro Perencanaan;
- d. Melaksanakan koordinasi berkelanjutan dengan BPKP Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Inspektorat Jenderal terkait penilaian Mandiri Maturitas SPIP;

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.



**TABEL 2. LAPORAN KEMAJUAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TRIWULAN II TAHUN 2025**

No	Tahapan	Indikator Output	Satuan	Bukti Dokumen	Volume 1 Tahun	Volume Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
A	Persiapan						
	Pemahaman	Jumlah laporan kegiatan sosialisasi/ FGD/ Diseminasi tentang SPIP	Laporan	Laporan kegiatan, Notulen, dan Daftar hadir sosialisasi/ FGD/ diseminasi tentang SPIP	4	2	50%
		Jumlah laporan kegiatan diklat terkait SPIP	Laporan	Laporan Kegiatan Diklat	1	1	100%
	Pemetaan	Jumlah laporan diagnostic assessment/ survey/ kajian / peneltian tentang SPIP dan identifikasi AOI (Area Of Improvement)	Laporan	Laporan	1	0	0%
B	Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pelaksanaan	Jumlah dokumen rencana penyelenggaraan SPIP	Dokumen	Rencana Penyelenggaraan SPIP	1	1	100%
	Tingkat Entitas	Jumlah dokumen penilaian risiko Level Entitas dan Aktivitas	Dokumen	Dokumen Register/ Daftar risiko dan peta resiko (tentatif)	1	1	100%
		Jumlah kebijakan/ prosedur/ pedoman dalam pembangunan infrastruktur	Kebijakan/ Prosedur/ Pedoman dll	Kebijakan/ SOP/ SK/ Nota dinas/ dokumen lainnya	1	0	50%
		Jumlah kegiatan internalisasi/ implementasi	Kegiatan	Laporan, Notulen, Materi, dan Daftar Hadir diseminasi, pelatihan, dll	4	0	0%

Tingkat Kegiatan	Jumlah dokumen penilaian risiko Level Entitas dan Aktivitas	Dokumen	Dokumen Profil Risiko dan peta risiko	1	1	100%
	Jumlah kebijakan/ prosedur/ pedoman dalam pembangunan infrastruktur	Kebijakan/ Prosedur/ Pedoman dll	Kebijakan/ SOP/ SK/ Nota dinas/ dokumen lainnya	1	0	0%
	Jumlah kegiatan internalisasi/ implementasi	Kegiatan	Laporan, Notulen, Materi, dan Daftar Hadir diseminasi, pelatihan, dll	4	2	50%
Pengembangan Berkelanjutan	Jumlah Rapat Berkala	Notulen	Notulen, dan daftar hadir	4	2	50%
	Jmlah laporan kemajuan penyelenggaraan SPIP	Laporan	Laporan triwulan dan Laporan tahunan	5	2	40%
	Prosentase penyelesaian tindak lanjut	Prosentase tindak lanjut	Laporan inspektorat, Laporan Satgas Setempat, Berita Acara, Action Plan yang disetujui pejabat structural terkait, Bukti Tindak Lanjut	1	0	0%

29

12

49,23%



Yogyakarta, 23 Juni 2025
Kepala Kantor Wilayah,

Agung Rektono Seto

Langkah 1: Penetapan Tujuan

Unit Pemilik Risiko: **Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta**

Periode Penerapan: **2025**

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kode	Potensi Risiko
1	2	3	4	5	6
Konteks MR: Standar Kinerja (Bagian Tata Usaha dan Umum)					
1	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Percentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1	Aplikasi internal dan media sosial rentan terhadap serangan injeksi
				2	Penyimpanan data pada server lokal belum memiliki backup
				3	Gangguan jaringan yang sering terjadi menghambat proses kinerja
				4	Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
Konteks MR : Risiko Fraud (Bagian Tata Usaha dan Umum)					
2	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Percentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	5	Potensi penerimaan gratifikasi dalam memberikan pelayanan
				6	Manipulasi data dan laporan dengan menyampaikan laporan fiktif atau tidak akurat
				7	Penyalahgunaan anggaran dengan penggunaan dana untuk keperluan pribadi atau di luar tujuan program
Konteks MR : Risiko Keuangan (Bagian Tata Usaha dan Umum)					
3	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Percentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	8	Gagalnya Tender pengadaan Barang dan Jasa
				9	Lambatnya penyerapan anggaran dikarenakan terjadi kendala saat pengajuan SPM
				10	Terdapat BMN yang hilang
				11	Ketidakcukupan anggaran
Konteks MR : Standar Kinerja (Divisi Pelayanan Hukum)					
4	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Percentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	12	Keterlambatan pelayanan publik AHU kepada masyarakat
				13	Kualitas SDM yang tidak memadai
				14	Pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal
5	Penyelenggaraan kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Percentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	15	Penanganan yang kurang optimal, terkait dengan waktu yang diperlukan untuk menanggapi pengaduan masyarakat terkait pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris
		Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Percentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	16	Kurang pemahaman masyarakat terkait Kekayaan Intelektual
			Percentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	17	Ketidakmampuan memenuhi standar waktu proses
Konteks MR : Fraud (Divisi Pelayanan Hukum)					
6	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Percentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	18	Adanya pungutan liar atau biaya tambahan yang tidak resmi yang diminta dari masyarakat atau pelaku usaha
7	Penyelenggaraan kekayaan Intelektual di	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Percentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	19	Pemalsuan dokumen pendaftaran Kekayaan Intelektual
Konteks MR : Keuangan (Divisi Pelayanan Hukum)					
8	Penyelenggaraan kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Percentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	20	Kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan PNBP yang menyebabkan ketidakakuratan laporan keuangan
		Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Percentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	21	Proses pengaduan masyarakat memerlukan biaya yang signifikan
9	Penyelenggaraan kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Percentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	22	Terdapat biaya tambahan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat
		Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Percentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	23	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang KI dapat merusak reputasi Kantor Wilayah yang berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat dan pemilik hak KI
			Percentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	24	Terdapat keterlambatan proses permohonan KI sehingga pemohon kehilangan minat dan berpotensi mengurangi pendapatan dari PNBP
Konteks MR: Standar Kinerja (Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum)					
10	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Percentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	25	Keterlambatan Penyelesaian Produk Hukum
11	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	26	Tidak ada mekanisme evaluasi yang jelas untuk mengukur keberhasilan program atau tindak lanjut pasca-pelatihan, seperti pendampingan atau monitoring

	Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	27	Evaluasi yang dilakukan tidak mendalam atau tidak komprehensif, sehingga produk hukum yang dihasilkan mengandung kelelahan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
			Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	28	Proses fasilitasi perencanaan peraturan daerah tidak selesai tepat waktu, menyebabkan penundaan dalam penyusunan atau pengesahan peraturan daerah
12	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIH di Wilayah	Persentase Anggota JDIH yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIH di Wilayah	29	Ketidaksesuaian layanan dengan standar yang ditetapkan oleh JDIH
		Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	30	Keterlambatan dalam memberikan bantuan hukum litigasi kepada pemohon
			Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	31	Keterlambatan dalam memberikan bantuan hukum non litigasi kepada pemohon
		Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	32	Kualitas program peningkatan sadar hukum di desa binaan tidak memenuhi target
13	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	33	Kualitas pelayanan yang tidak konsisten

Konteks MR: Risiko Fraud (Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum)

14	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	34	Kolusi dengan Pihak Eksternal
15	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	35	Dana yang dialokasikan untuk pelatihan digunakan tidak sesuai peruntukannya, seperti pengalihan dana untuk keperluan pribadi atau kegiatan lain
		Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	36	Adanya dokumen palsu atau tidak lengkap yang disertakan dalam proses evaluasi untuk mempermudah pengesahan produk hukum
			Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	37	Adanya dokumen palsu atau tidak lengkap yang disertakan dalam proses fasilitasi untuk mempermudah pengesahan peraturan daerah
16	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIH di Wilayah	Persentase Anggota JDIH yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIH di Wilayah	38	Penyalahgunaan anggaran JDIH untuk kepentingan pribadi atau kelompok
		Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	39	Pungutan liar atau praktik korupsi dalam proses pemberian bantuan hukum
			Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	40	Pungutan liar atau praktik korupsi dalam proses pemberian bantuan hukum
		Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	41	Pungutan liar atau praktik korupsi dalam pelaksanaan program
17	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	42	Penyalahgunaan wewenang oleh oknum petugas

Konteks MR: Risiko Keuangan (Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum)

18	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	43	Pengelolaan Anggaran yang Tidak Efisien
19	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	44	Realisasi penggunaan dana tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah disetujui, menyebabkan penyimpangan atau defisit anggaran
		Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	45	Penggunaan dana tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah disetujui, menyebabkan penyimpangan atau defisit



Langkah 2: Identifikasi Risiko

Unit Pemilik Risiko: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Periode Penerapan: 2025

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kode	Potensi Risiko	Pemilik Risiko	Kode	Potensi Penyebab Risiko	Sumber (Internal/Eksternal)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Konteks MR: Standar Kinerja (Bagian Tata Usaha dan Umum)								
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Percentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1	Aplikasi internal dan media sosial rentan terhadap serangan injeksi	Ka Kanwil	1.1	Sistem keamanan yang kurang memadai	Eksternal
						1.2	Terjadinya kelalain pegawai pemegang akun media sosial kanwil	Internal
			2	Penyimpanan data pada server lokal belum memiliki backup	Ka Kanwil	2.1	Keterbatasan kapasitas penyimpanan server	Internal
			3	Gangguan jaringan yang sering terjadi menghambat proses kinerja	Ka Kanwil	3.1	Keterbatasan bandwidth dari pusdatin	Eksternal
2	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Percentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	5	Potensi penerimaan gratifikasi dalam memberikan pelayanan	Ka Kanwil	5.1	Rendahnya integritas petugas pelayanan	Internal
			6	Manipulasi data dan laporan dengan menyampaikan laporan fiktif atau tidak akurat	Ka Kanwil	6.1	Kurangnya verifikasi dan validasi data	Internal
			7	Penyalahgunaan anggaran dengan penggunaan dana untuk keperluan pribadi atau di luar tujuan program	Ka Kanwil	7.1	Kurangnya pengawasan dalam penyerapan anggaran	Internal
						7.2	Pengelolaan anggaran yang tidak transparan	Internal
Konteks MR : Risiko Fraud (Bagian Tata Usaha dan Umum)								
3	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Percentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	8	Gagalnya Tender pengadaan Barang dan Jasa	Kabag TU Umum	8.1	Kualifikasi penyedia tidak memenuhi syarat dan Calon Penyedia tidak hadir dalam undangan Klarifikasi administrasi dan Teknis	Eksternal
			9	Lambatnya penyerapan anggaran dikarenakan terjadi kendala saat pengajuan SPM	Kabag TU Umum	9.1	Kendala pengajuan SPM antara lain human eror, indikasi fraud, dan lamanya data dukung dari pihak pengelola dan pihak ketiga	Internal
			10	Terdapat BMN yang hilang	Kabag TU Umum	10.1	Petugas lalai mencatat BMN yang dikuasai pegawai, atau salah input data.	Internal
			11	Ketidakcukupan anggaran	Ka Kanwil	11.1	Perencanaan anggaran yang tidak realistik atau tidak sesuai dengan kebutuhan program	Internal

						11.2	Perubahan kebijakan atau prioritas yang memengaruhi alokasi anggaran	Internal
--	--	--	--	--	--	------	--	----------

Konteks MR : Risiko Standar Kinerja (Divisi Pelayanan Hukum)								
4	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	12	Keterlambatan pelayanan publik AHU kepada masyarakat	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	12.1	Keterbatasan SDM atau infrastruktur pendukung	Internal
6	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	13	Kualitas SDM yang tidak memadai	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	13.1	Kurangnya kesadaran masyarakat terkait kriteria Kekayaan Intelektual	Internal
			14	Pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	14.1	Efisiensi anggaran yang harus menerapkan sistem WFH/WFO	Internal
			15	Penanganan yang kurang optimal, terkait dengan waktu yang diperlukan untuk menanggapi pengaduan masyarakat terkait pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	15.1	Penyelesaian laporan pengaduan terkait notaris yang tidak tuntas atau tidak memenuhi standar prosedur yang berlaku.	Internal
7	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	16	Kurang pemahaman masyarakat terkait Kekayaan Intelektual	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	16.1	Informasi Kekayaan Intelektual belum menjangkau tempat/wilayah yang berpotensi menghasilkan produk Kekayaan Intelektual	Eksternal
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	17	Ketidakmampuan memenuhi standar waktu proses	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	17.1	Standar waktu proses yang telah ditetapkan (seperti waktu pemeriksaan substantif atau penerbitan sertifikat) mungkin tidak dapat dipenuhi karena lonjakan permohonan	Internal
Konteks MR : Risiko Fraud (Divisi Pelayanan Hukum)								
8	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	18	Adanya pungutan liar atau biaya tambahan yang tidak resmi yang diminta dari masyarakat atau pelaku usaha	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	18.1	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait alur mekanisme dan prosedur terkait layanan AHU	Eksternal
		#REF!	19	Pemalsuan dokumen pendaftaran Kekayaan Intelektual	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	19.1	Kurangnya pengawasan terhadap dokumen yang diajukan	Internal
Konteks MR : Risiko Keuangan (Divisi Pelayanan Hukum)								
12	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	20	Kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan PNBP yang menyebabkan ketidakakuratan laporan keuangan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	20.1	Kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan keuangan	Internal
13	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	21	Proses pengaduan masyarakat memerlukan biaya yang signifikan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	21.1	Kurangnya alokasi anggaran khusus untuk penanganan pengaduan	Internal

14	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	22	Terdapat biaya tambahan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	22.1	Tingginya angka pelanggaran Kekayaan Intelektual yang disebabkan oleh ketidaktauhan masyarakat	Eksternal
15	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	23	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang KI dapat merusak reputasi Kantor Wilayah yang berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat dan pemilik hak KI	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	23.1	Penanganan kasus pelanggaran KI yang tidak efektif	Internal
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	24	Terdapat keterlambatan proses permohonan KI sehingga pemohon kehilangan minat dan berpotensi mengurangi pendapatan dari PNBP	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	24.1	Kapasitas staf dan sistem yang tidak mencukupi untuk menangani peningkatan permohonan	Internal

Konteks MR : Standar Kinerja (Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum)

16	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	25	Keterlambatan Penyelesaian Produk Hukum	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	25.1	Risiko keterlambatan dalam penyusunan, review, atau pengesahan rancangan produk hukum di daerah karena beban kerja yang tinggi, kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, atau koordinasi yang kurang efektif antara Kanwil dan pemerintah daerah	Internal
17	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	26	Tidak ada mekanisme evaluasi yang jelas untuk mengukur keberhasilan program atau tindak lanjut pasca-pelatihan, seperti pendampingan atau monitoring	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	26.1	Tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas untuk pelaksanaan dan evaluasi program	Internal
18	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	27	Evaluasi yang dilakukan tidak mendalam atau tidak komprehensif, sehingga produk hukum yang dihasilkan mengandung kelemahan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	27.1	Beban kerja yang tinggi atau antrean produk hukum yang harus dievaluasi.	Internal
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	28	Proses fasilitasi perencanaan peraturan daerah tidak selesai tepat waktu, menyebabkan penundaan dalam penyusunan atau pengesahan peraturan daerah	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	28.1	Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam memberikan fasilitasi perencanaan peraturan daerah	Internal
19	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	29	Ketidaksesuaian layanan dengan standar yang ditetapkan oleh JDIHN	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	29.1	Kurangnya tenaga ahli atau staf yang kompeten dalam pengelolaan sistem informasi hukum	Internal
20	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	30	Keterlambatan dalam memberikan bantuan hukum litigasi kepada pemohon	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	30.1	Permohonan bantuan hukum litigasi yang melebihi kapasitas layanan	Internal

		Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	31	Keterlambatan dalam memberikan bantuan hukum non litigasi kepada pemohon	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	31.1	Permohonan bantuan hukum non litigasi yang melebihi kapasitas layanan	Internal
21	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	32	Kualitas program peningkatan sadar hukum di desa binaan tidak memenuhi target	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	32.1	Kurangnya koordinasi antara Kanwil Kemenkum dengan pemerintahan daerah atau des	Internal
22	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	33	Kualitas pelayanan yang tidak konsisten	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	33.1	Kurangnya pelatihan dan pembinaan bagi petugas pelayanan	Internal
Konteks MR : Risiko Fraud (Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum)								
23	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	34	Kolusi dengan Pihak Eksternal	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	34.1	Risiko kolusi antara pejabat Kanwil dengan pihak eksternal (pemerintah daerah) untuk menguntungkan kepentingan tertentu dalam proses penyusunan produk hukum.	Eksternal
24	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	35	Dana yang dialokasikan untuk pelatihan digunakan tidak sesuai peruntukannya, seperti pengalihan dana untuk keperluan pribadi atau kegiatan lain	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	35.1	Kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan.	Internal

25	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	36	Adanya dokumen palsu atau tidak lengkap yang disertakan dalam proses evaluasi untuk mempermudah pengesahan produk hukum	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	36.1	Budaya organisasi yang kurang mendukung integritas dan akuntabilitas	Internal
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	37	Adanya dokumen palsu atau tidak lengkap yang disertakan dalam proses fasilitasi untuk mempermudah pengesahan peraturan daerah	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	37.1	Budaya organisasi yang kurang mendukung integritas dan akuntabilitas	Internal
26	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	38	Penyalahgunaan anggaran JDIHN untuk kepentingan pribadi atau kelompok	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	38.1	Kurangnya sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan anggaran	Internal
27	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	39	Pungutan liar atau praktik korupsi dalam proses pemberian bantuan hukum	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	39.1	Belum berjalannya sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dan aman	Internal
		Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	40	Pungutan liar atau praktik korupsi dalam proses pemberian bantuan hukum	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	40.1	Belum berjalannya sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dan aman	Internal
28	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	41	Pungutan liar atau praktik korupsi dalam pelaksanaan program	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	41.1	Tidak adanya sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dan aman	Internal
29	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	42	Penyalahgunaan wewenang oleh oknum petugas	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	42.1	Lemahnya sistem pengawasan internal	Internal
Konteks MR : Risiko Keuangan (Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum)								
30	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	43	Pengelolaan Anggaran yang Tidak Efisien	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	43.1	Risiko pengelolaan anggaran yang tidak efektif dan efisien dalam kegiatan fasilitasi rancangan produk hukum, seperti pemborosan atau alokasi dana yang tidak tepat sasaran.	Internal

31	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	44	Realisasi penggunaan dana tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah disetujui, menyebabkan penyimpangan atau defisit anggaran	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	44.1	Kurangnya kapasitas staf dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan anggaran	Internal
32	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	45	Penggunaan dana tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah disetujui, menyebabkan penyimpangan atau defisit	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	45.1	Proses administrasi keuangan yang rumit dan lambat.	Internal



Agung Rektono Seto

Langkah 3: Analisis Risiko

Unit Pemilik Risiko:

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Y

Periode Penerapan:

2025

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Key Risk Indikator (KRI) / Indikator Risiko Utama	Toleransi Risiko	Kemungkinan terjadinya risiko		Dampak risiko		Tingkat Risiko	Profil Risiko
				Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Konteks MR: Standar Kinerja (Bagian Tata Usaha dan Umum)									
1.1	Sistem keamanan yang kurang memadai	Jumlah kejadian upaya peretasan aplikasi, media sosial	4	Moderat	3	Kementerian	3	9	Risiko Rendah
1.2	Terjadinya kelalain pegawai pemegang akun media sosial kanwil	Jumlah kejadian upaya peretasan aplikasi, media sosial	4	Moderat	3	Kementerian	3	9	Risiko Rendah
2.1	Keterbatasan kapasitas penyimpanan server	Jumlah penyimpanan data pada server lokal yang tidak terbackup	6	Tinggi	4	UKE I	2	8	Risiko Rendah
3.1	Keterbatasan bandwidth dari pusdatin	Jumlah gangguan jaringan yang sering terjadi	6	Tinggi	4	Kementerian	3	12	Risiko Sedang
4.1	Jumlah SDM di bidang kehumasan tidak memadai	Jumlah kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM)	2	Rendah	2	Kementerian	3	6	Risiko Rendah
Konteks MR: Risiko Fraud (Bagian Tata Usaha dan Umum)									
5.1	Rendahnya integritas petugas pelayanan	Jumlah penerimaan gratifikasi dalam memberikan pelayanan	4	Moderat	3	Masyarakat Umum	5	15	Risiko Sedang
6.1	Kurangnya verifikasi dan validasi data	Jumlah data dan laporan yang dilakukan manipulasi	4	Moderat	3	UKE I	2	6	Risiko Rendah
7.1	Kurangnya pengawasan dalam penyerapan anggaran	Jumlah penyalahgunaan anggaran dengan penggunaan dana untuk keperluan pribadi atau di luar tujuan program	4	Moderat	3	Kementerian	3	9	Risiko Rendah
7.2	Pengelolaan anggaran yang tidak transparan	Jumlah penyalahgunaan anggaran dengan penggunaan dana untuk keperluan pribadi atau di luar tujuan program	4	Moderat	3	Kementerian	3	9	Risiko Rendah
Konteks MR: Risiko Keuangan (Bagian Tata Usaha dan Umum)									
8.1	Kualifikasi penyedia tidak memenuhi syarat dan Calon Penyedia tidak hadir dalam undangan Klarifikasi administrasi dan Teknis	Jumlah Tender pengadaan Barang dan Jasa yang gagal	3	Moderat	3	UKE I	2	6	Risiko Rendah
9.1	Kendala pengajuan SPM anatara lain human eror, indikasi fraud, dan lamanya data dukung dari pihak pengelola dan pihak ketiga	Jumlah anggaran yang tidak terserap	2	Rendah	2	Kementerian	3	6	Risiko Rendah
10.1	Petugas lalai mencatat BMN yang dikuasai pegawai, atau salah input data.	Jumlah BMN yang hilang	6	Tinggi	4	Kementerian	3	12	Risiko Sedang
11.1	Perencanaan anggaran yang tidak realistik atau tidak sesuai dengan kebutuhan program	Jumlah kegiatan yang tidak terlaksana	2	Rendah	2	Kementerian	3	6	Risiko Rendah
11.2	Perubahan kebijakan atau prioritas yang memengaruhi alokasi anggaran	Jumlah kegiatan yang tidak terlaksana	2	Rendah	2	Kementerian	3	6	Risiko Rendah

Konteks MR: Standar Kinerja (Divisi Pelayanan Hukum)											
12.1	Keterbatasan SDM atau infrastruktur pendukung	Jumlah pelayanan publik AHU kepada masyarakat yang terlambat	2	Rendah	2	Masyarakat Umum	5	10			Risiko Rendah

25.1	Risiko keterlambatan dalam penyusunan, review, atau pengesahan rancangan produk hukum di daerah karena beban kerja yang tinggi, kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, atau koordinasi yang kurang efektif antara Kanwil dan pemerintah daerah	Jumlah keterlambatan Penyelesaian Produk Hukum	4	Moderat	3	K/L/D Lain	4	12	Risiko Sedang
27.1	Beban kerja yang tinggi atau antrean produk hukum yang harus dievaluasi.	Jumlah produk hukum yang dihasilkan mengandung kelemahan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	2	Rendah	2	K/L/D Lain	4	8	Risiko Rendah
28.1	Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam memberikan fasilitasi perencanaan peraturan daerah	Jumlah fasilitasi perencanaan peraturan daerah tidak selesai tepat waktu, menyebabkan penundaan dalam penyusunan atau pengesahan peraturan daerah	6	Tinggi	4	K/L/D Lain	4	16	Risiko Tinggi
29.1	Kurangnya tenaga ahli atau staf yang kompeten dalam pengelolaan sistem informasi hukum	Jumlah layanan dengan standar yang ditetapkan oleh JDIHN yang tidak sesuai	2	Rendah	2	Masyarakat Umum	5	10	Risiko Rendah
30.1	Permohonan bantuan hukum litigasi yang melebihi kapasitas layanan	Jumlah bantuan hukum litigasi kepada pemohon yang terlambat	4	Moderat	3	Masyarakat Umum	5	15	Risiko Sedang
31.1	Permohonan bantuan hukum non litigasi yang melebihi kapasitas layanan	Jumlah bantuan hukum non litigasi kepada pemohon yang terlambat	4	Moderat	3	Masyarakat Umum	5	15	Risiko Sedang
32.1	Kurangnya koordinasi antara Kanwil Kemenkum dengan pemerintahan daerah atau des	Jumlah program peningkatan sadar hukum di desa binaan yang tidak memenuhi target	4	Moderat	3	UKE I	2	6	Risiko Rendah

33.1	Kurangnya pelatihan dan pembinaan bagi petugas pelayanan	Jumlah pelayanan yang buruk atau tidak memuaskan	4	Moderat	3	Masyarakat Umum	5	15	Risiko Sedang
Konteks MR: Risiko Fraud (Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum)									
34.1	Risiko kolusi antara pejabat Kanwil dengan pihak eksternal (pemerintah daerah) untuk menguntungkan kepentingan tertentu dalam proses penyusunan produk hukum.	Jumlah kolusi dengan Pihak Eksternal	2	Rendah	2	Kementerian	3	6	Risiko Rendah
35.1	Kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan.	Jumlah pengalihan dana untuk keperluan pribadi atau kegiatan lain	2	Rendah	2	Kementerian	3	6	Risiko Rendah
36.1	Budaya organisasi yang kurang mendukung integritas dan akuntabilitas	Jumlah dokumen palsu atau tidak lengkap yang disertakan dalam proses evaluasi untuk mempermudah pengesahan produk hukum	4	Moderat	3	UKE I	2	6	Risiko Rendah
37.1	Budaya organisasi yang kurang mendukung integritas dan akuntabilitas	Jumlah dokumen palsu atau tidak lengkap yang disertakan dalam proses fasilitasi untuk mempermudah pengesahan peraturan daerah	4	Moderat	3	UKE I	2	6	Risiko Rendah
38.1	Kurangnya sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan anggaran	Jumlah penyalahgunaan anggaran JDHN untuk kepentingan pribadi atau kelompok	2	Rendah	2	Masyarakat Umum	5	10	Risiko Rendah
39.1	Belum berjalannya sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dan aman	Jumlah pungutan liar atau praktik korupsi dalam proses pemberian bantuan hukum	2	Rendah	2	Masyarakat Umum	5	10	Risiko Rendah
40.1	Belum berjalannya sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dan aman	Jumlah pungutan liar atau praktik korupsi dalam proses pemberian bantuan hukum	2	Rendah	2	Masyarakat Umum	5	10	Risiko Rendah
41.1	Tidak adanya sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dan aman	Jumlah pungutan liar atau praktik korupsi dalam pelaksanaan program	2	Rendah	2	Masyarakat Umum	5	10	Risiko Rendah
42.1	Lemahnya sistem pengawasan internal	Jumlah penyalahgunaan wewenang oleh oknum petugas	4	Moderat	3	UKE I	2	6	Risiko Rendah
Konteks MR: Risiko Keuangan (Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum)									
43.1	Risiko pengelolaan anggaran yang tidak efektif dan efisien dalam kegiatan fasilitasi rancangan produk hukum, seperti pemborosan atau alokasi dana yang tidak tepat sasaran.	Jumlah Anggaran yang Tidak Efisien	2	Rendah	2	Kementerian	3	6	Risiko Rendah
44.1	Kurangnya kapasitas staf dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan anggaran	Jumlah penyimpangan atau defisit anggaran	4	Moderat	3	UKE I	2	6	Risiko Rendah
45.1	Proses administrasi keuangan yang rumit dan lambat.	Jumlah penyimpangan atau defisit	2	Rendah	2	Kementerian	3	6	Risiko Rendah

CATATAN:



Aging Rekono Seto

Langkah 4: Evaluasi Risiko

Unit Pemilik Risiko: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Periode Penerapan: 2025

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kode	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	Prioritas Risiko	KRI / Indikator Utama Risiko	Toleransi Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Percentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1.1	Sistem keamanan yang kurang memadai	9	18	Jumlah kejadian upaya peretasan aplikasi, media sosial	4
			1.2	Terjadinya kelalain pegawai pemegang akun media sosial kanwil	9	19	Jumlah kejadian upaya peretasan aplikasi, media sosial	4
			2.1	Keterbatasan kapasitas penyimpanan server	8	22	Jumlah penyimpanan data pada server lokal yang tidak terbackup	6
			3.1	Keterbatasan bandwidth dari pusdatin	12	9	Jumlah gangguan jaringan yang sering terjadi	6
			4.1	Jumlah SDM di bidang kehumasan tidak memadai	6	27	Jumlah kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM)	2
			5.1	Rendahnya integritas petugas pelayanan	15	2	Jumlah penerimaan gratifikasi dalam memberikan pelayanan	4
			6.1	Kurangnya verifikasi dan validasi data	6	28	Jumlah data dan laporan yang dilakukan manipulasi	4
			7.1	Kurangnya pengawasan dalam penyerapan anggaran	9	20	Jumlah penyalahgunaan anggaran dengan penggunaan dana untuk keperluan pribadi atau di luar tujuan program	4
			7.2	Pengelolaan anggaran yang tidak transparan	9	21	Jumlah penyalahgunaan anggaran dengan penggunaan dana untuk keperluan pribadi atau di luar tujuan program	4
			8.1	Kualifikasi penyedia tidak memenuhi syarat dan Calon Penyedia tidak hadir dalam undangan Klarifikasi administrasi dan Teknis	6	29	Jumlah Tender pengadaan Barang dan Jasa yang gagal	3
			9.1	Kendala pengajuan SPM anatara lain human error, indikasi fraud, dan lamanya data dukung dari pihak	6	30	Jumlah anggaran yang tidak terserap	2

			10.1	Petugas lalai mencatat BMN yang dikuasai pegawai, atau salah input data.	12	10	Jumlah BMN yang hilang	6
			11.1	Perencanaan anggaran yang tidak realistik atau tidak sesuai dengan	6	31	Jumlah kegiatan yang tidak terlaksana	2
			11.2	Perubahan kebijakan atau prioritas yang memengaruhi alokasi anggaran	6	32	Jumlah kegiatan yang tidak terlaksana	2
	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	12.1	Keterbatasan SDM atau infrastruktur pendukung	10	12	Jumlah pelayanan publik AHU kepada masyarakat yang terlambat	2
	#REF!	#REF!	13.1	Kurangnya kesadaran masyarakat terkait kriteria Kekayaan Intelektual	8	23	Jumlah masyarakat yang belum mendaftarkan produknya pada kekayaan intelektual	6
			14.1	Efisiensi anggaran yang harus menerapkan sistem WFH/WFO	15	3	Jumlah penanganan yang kurang optimal, terkait dengan waktu yang diperlukan untuk menanggapi pengaduan masyarakat terkait layanan AHU	4
			15.1	Penyelesaian laporan pengaduan terkait notaris yang tidak tuntas atau tidak memenuhi standar prosedur yang berlaku.	15	4	Jumlah penanganan yang kurang optimal, terkait dengan waktu yang diperlukan untuk menanggapi pengaduan masyarakat terkait pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris	4
			16.1	Informasi Kekayaan Intelektual belum menjangkau tempat/wilayah yang berpotensi menghasilkan produk Kekayaan Intelektual	8	24	Jumlah masyarakat yang belum mendaftarkan produknya pada kekayaan intelektual	6
	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	17.1	Standar waktu proses yang telah ditetapkan (seperti waktu pemeriksaan substantif atau penerbitan sertifikat) mungkin tidak dapat dipenuhi karena lonjakan permohonan	6	33	Jumlah proses pendaftaran kekayaan intelektual yang tidak selesai sesuai standar proses	4
	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	18.1	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait alur mekanisme dan prosedur terkait layanan AHU	15	5	Jumlah pungutan liar atau biaya tambahan yang tidak resmi yang diminta dari masyarakat atau pelaku usaha	4

	#REF!	#REF!	19.1	Kurangnya pengawasan terhadap dokumen yang diajukan	6	34	Jumlah proses penyelesaian pengaduan yang dimanipulasi	4
	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	#REF!	20.1	Kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan keuangan	6	35	Jumlah ketidakakuratan laporan keuangan terkait pelaporan PNBP AHU	4
	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	21.1	Kurangnya alokasi anggaran khusus untuk penanganan pengaduan	6	36	Jumlah kurangnya biaya yang dibutuhkan untuk proses pengaduan masyarakat	4
	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	22.1	Tingginya angka pelanggaran Kekayaan Intelektual yang disebabkan oleh ketidaktahanan masyarakat	6	37	Jumlah biaya tambahan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat	4
	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	23.1	Penanganan kasus pelanggaran KI yang tidak efektif	8	25	Jumlah pelanggaran KI	6
	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	24.1	Kapasitas staf dan sistem yang tidak mencukupi untuk menangani peningkatan permohonan	6	38	Jumlah proses permohonan KI yang belum diselesaikan	4
	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	25.1	Risiko keterlambatan dalam penyusunan, review, atau pengesahan rancangan produk hukum di daerah karena beban kerja yang tinggi, kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, atau koordinasi yang kurang efektif antara Kanwil dan pemerintah daerah	12	11	Jumlah keterlambatan Penyelesaian Produk Hukum	4
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	27.1	Beban kerja yang tinggi atau antrean produk hukum yang harus dievaluasi.	8	26	Jumlah produk hukum yang dihasilkan mengandung kelemahan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	2

	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	28.1	Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam memberikan fasilitasi perencanaan peraturan daerah	16	1	Jumlah fasilitasi perencanaan peraturan daerah tidak selesai tepat waktu, menyebabkan penundaan dalam penyusunan atau pengesahan peraturan daerah	6
	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	29.1	Kurangnya tenaga ahli atau staf yang kompeten dalam pengelolaan sistem informasi hukum	10	13	Jumlah layanan dengan standar yang ditetapkan oleh JDIHN yang tidak sesuai	2
		Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	30.1	Permohonan bantuan hukum litigasi yang melebihi kapasitas layanan	15	6	Jumlah bantuan hukum litigasi kepada pemohon yang terlambat	4
	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	31.1	Permohonan bantuan hukum non litigasi yang melebihi kapasitas layanan	15	7	Jumlah bantuan hukum non litigasi kepada pemohon yang terlambat	4
	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	32.1	Kurangnya koordinasi antara Kanwil Kemenkum dengan pemerintahan daerah atau des	6	39	Jumlah program peningkatan sadar hukum di desa binaan yang tidak memenuhi target	4
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	33.1	Kurangnya pelatihan dan pembinaan bagi petugas pelayanan	15	8	Jumlah pelayanan yang buruk atau tidak memuaskan	4
	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	34.1	Risiko kolusi antara pejabat Kanwil dengan pihak eksternal (pemerintah daerah) untuk menguntungkan kepentingan tertentu dalam proses penyusunan produk hukum.	6	40	Jumlah kolusi dengan Pihak Eksternal	2
	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	35.1	Kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan.	6	41	Jumlah pengalihan dana untuk keperluan pribadi atau kegiatan lain	2
		Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	36.1	Budaya organisasi yang kurang mendukung integritas dan akuntabilitas	6	42	Jumlah dokumen palsu atau tidak lengkap yang disertakan dalam proses evaluasi untuk mempermudah pengesahan produk hukum	4
	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	37.1	Budaya organisasi yang kurang mendukung integritas dan akuntabilitas	6	43	Jumlah dokumen palsu atau tidak lengkap yang disertakan dalam proses fasilitasi untuk mempermudah pengesahan peraturan daerah	4

	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	38.1	Kurangnya sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan anggaran	10	14	Jumlah penyalahgunaan anggaran JDIHN untuk kepentingan pribadi atau kelompok	2
		#REF!	39.1	Belum berjalananya sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dan aman	10	15	Jumlah pungutan liar atau praktik korupsi dalam proses pemberian bantuan hukum	2
	#REF!	#REF!	40.1	Belum berjalananya sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dan aman	10	16	Jumlah pungutan liar atau praktik korupsi dalam proses pemberian bantuan hukum	2
	#REF!	#REF!	41.1	Tidak adanya sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dan aman	10	17	Jumlah pungutan liar atau praktik korupsi dalam pelaksanaan program	2
		#REF!	42.1	Lemahnya sistem pengawasan internal	6	44	Jumlah penyalahgunaan wewenang oleh oknum petugas	4
	#REF!	#REF!	43.1	Risiko pengelolaan anggaran yang tidak efektif dan efisien dalam kegiatan fasilitasi rancangan produk hukum, seperti pemborosan atau alokasi dana yang tidak tepat sasaran.	6	45	Jumlah Anggaran yang Tidak Efisien	2
	#REF!	#REF!	44.1	Kurangnya kapasitas staf dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan anggaran	6	46	Jumlah penyimpangan atau defisit anggaran	4
			45.1	Proses administrasi keuangan yang rumit dan lambat.	6	47	Jumlah penyimpangan atau defisit	2



Langkah 5: Rencana Aksi Penanganan Risiko

Unit PemKantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Periode 2025

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil risiko	Prioritas Risiko	KRI / Indikator Utama Risiko	Toleransi Risiko	Kode	Pengendalian Risiko (Prv/RM/Crr)	KCI/ Indikator Pengendalian Risiko	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.1	Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam memberikan fasilitasi perencanaan peraturan daerah	16	1	Jumlah fasilitasi perencanaan peraturan daerah tidak selesai tepat waktu, menyebabkan penundaan dalam penyusunan atau pengesahan peraturan daerah	5	Prv 28.1	Melakukan pelatihan teknis penyusunan peraturan daerah, analisis kebijakan, dan fasilitasi stakeholder	Jumlah Pelatihan Teknis penyusunan peraturan daerah, analisis kebijakan, dan fasilitasi stakeholder	2 dokumen	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
						RM 28.1	Melakukan evaluasi kinerja SDM dan tim untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki	Jumlah laporan evaluasi kinerja SDM setelah dilakukannya Pelatihan Teknis penyusunan peraturan daerah, analisis kebijakan, dan fasilitasi stakeholder	2 dokumen	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
						Crr 28.1	Melakukan penyederhanaan proses yang rumit untuk mengurangi beban kerja SDM dengan memanfaatkan Aplikasi MONDAY dan SAPA HUKUM	Persentase keberhasilan tingkat adopsi dan pemanfaatan aplikasi MONDAY dan SAPA HUKUM dalam menjalankan tugas	90%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
5.1	Rendahnya integritas petugas pelayanan	15	2	Jumlah penerimaan gratifikasi dalam memberikan pelayanan	3	RM 5.1	Menetapkan sanksi yang tegas dan proporsional kepada petugas jika terbukti melanggar integritas, sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persentase penerapan sanksi terhadap petugas yang terbukti melanggar integritas sesuai dengan peraturan yang berlaku	95%	Ka Kanwil
						Crr 5.1	Semua petugas memahami dan menandatangani komitmen terhadap kode etik dan pakta integritas	Jumlah pegawai yang telah menandatangani komitmen terhadap kode etik dan pakta integritas	1 laporan	Ka Kanwil
14.1	Efisiensi anggaran yang harus menerapkan sistem WFH/WFO	15	3	Jumlah penanganan yang kurang optimal, terkait dengan waktu yang diperlukan untuk menanggapi pengaduan masyarakat terkait layanan AHU	3	RM 14.1	Memaksimalkan layanan melalui media sosial	Persentase layanan media yang digunakan untuk memaksimalkan layanan pada masa efisiensi anggaran	1 dokumen	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
						Crr 14.1	Menggunakan fitur Live pada aplikasi Instagram dan Tiktok untuk masyarakat yang ingin bertanya secara online dan media whatsapp sebagai layanan secara elektronik	Jumlah pelayanan online dan frekuensi live setiap sesi	12 Laporan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
15.1	Penyelesaian laporan pengaduan terkait notaris yang tidak tuntas atau tidak memenuhi standar prosedur yang berlaku.	15	4	Jumlah penanganan yang kurang optimal, terkait dengan waktu yang diperlukan untuk menanggapi pengaduan masyarakat terkait pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris	3	RM 15.1	Memantau progres penyelesaian pengaduan secara berkala untuk memastikan tidak ada penundaan atau penyimpangan dari SOP	Jumlah pengaduan yang dipantau secara berkala dan diselesaikan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)	1 Laporan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
						Crr 15.1	Monitoring dan evaluasi berkala terhadap proses penanganan pengaduan notaris untuk memastikan perbaikan yang dilakukan efektif dengan memanfaatkan aplikasi SIEMON	Jumlah pengaduan yang dipantau secara berkala dan diselesaikan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) melalui Aplikasi SIEMON	12 laporan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
18.1	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait alur mekanisme dan prosedur terkait layanan AHU	15	5	Jumlah pungutan liar atau biaya tambahan yang tidak resmi yang diminta dari masyarakat atau pelaku usaha	3	RM 18.1	Menyediakan panduan layanan di loket layanan, website, atau media sosial.	Jumlah unit layanan yang menyediakan panduan layanan secara lengkap di loket layanan/website/ atau media sosial	1 Dokumen	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
						Crr 18.1	Melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat, baik melalui seminar, workshop, atau kunjungan ke komunitas	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat melalui seminar, workshop, /kunjungan komunitas	4 Laporan / dokumen	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
30.1	Permohonan bantuan hukum litigasi yang melebihi kapasitas layanan	15	6	Jumlah bantuan hukum litigasi kepada pemohon yang terlambat	3	RM 30.1	Membentuk tim khusus untuk menangani pemberian bantuan hukum litigasi	Jumlah tim khusus yang dibentuk untuk menangani pemberian bantuan hukum litigasi	1 Tim	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
						Crr 30.1	Memperluas kolaborasi dengan lembaga lain seperti LBH atau perguruan tinggi untuk berbagi beban kasus	Jumlah perjanjian kerja sama (MoU) atau kegiatan kolaboratif yang terjalin dengan lembaga bantuan hukum (LBH) atau perguruan tinggi dalam satu tahun	4 Kegiatan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
31.1	Permohonan bantuan hukum non litigasi yang melebihi kapasitas layanan	15	7	Jumlah bantuan hukum non litigasi kepada pemohon yang terlambat	3	RM 31.1	Membentuk tim khusus untuk menangani pemberian bantuan hukum non litigasi	Jumlah tim khusus yang dibentuk untuk menangani pemberian bantuan hukum non-litigasi	1 Tim	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum

					Crr	31.1	Memperluas kolaborasi dengan lembaga lain seperti LBH atau perguruan tinggi untuk berbagi beban kasus	Jumlah perjanjian kerja sama (MoU) atau kegiatan kolaboratif yang terjalin dengan lembaga bantuan hukum (LBH) atau perguruan tinggi dalam satu tahun	4 Kegiatan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	
33.1	Kurangnya pelatihan dan pembinaan bagi petugas pelayanan	15	8	Jumlah pelayanan yang buruk atau tidak memuaskan	3	RM	33.1	Menyelenggarakan pelatihan rutin bagi petugas pelayanan, baik secara tatap muka maupun online, untuk meningkatkan kompetensi teknis	Frekuensi penyelenggaraan pelatihan rutin bagi petugas pelayanan, baik secara tatap muka maupun online	2 Kegiatan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
						Crr	33.1	Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja petugas untuk mengidentifikasi apakah pelatihan telah berdampak positif	Persentase pelaksanaan evaluasi berkala terhadap peningkatan kinerja petugas pasca-pelatihan	90%	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
3.1	Keterbatasan bandwidth dari pusdatin	12	9	Jumlah gangguan jaringan yang sering terjadi	5	RM	3.1	Mengimplementasikan sistem manajemen bandwidth untuk memprioritaskan penggunaan	Persentase keberhasilan implementasi sistem manajemen bandwidth dalam memastikan aplikasi	95%	Ka Kanwil
						Crr	3.1	Melakukan koordinasi rutin dengan Pusdatin untuk memastikan ketersediaan dan keandalan bandwidth	Jumlah kegiatan koordinasi rutin dengan Pusdatin untuk memastikan ketersediaan dan keandalan bandwidth	1 Kegiatan	Ka Kanwil
10.1	Petugas lalai mencatat BMN yang dikuasai pegawai, atau salah input data.	12	10	Jumlah BMN yang hilang	5	RM	10.1	Menetapkan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku jika ditemukan kelalaihan atau pelanggaran	Persentase penerapan sanksi disiplin terhadap kasus kelalaihan atau pelanggaran yang teridentifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku	90%	Kabag TU Umum
						Crr	10.1	Melakukan pengawasan dan monitoring secara real-time dengan memanfaatkan penerapan teknologi aplikasi TEBAS BMN	Jumlah kegiatan pelaksanaan pengawasan dan monitoring real-time melalui aplikasi TEBAS BMN terhadap total aset yang diawasi	4 Laporan	Kabag TU Umum
25.1	Risiko keterlambatan dalam penyusunan, review, atau pengesahan rancangan produk hukum di daerah karena beban kerja yang tinggi, kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, atau koordinasi yang kurang efektif antara Kanwil dan pemerintah daerah	12	11	Jumlah keterlambatan Penyelesaian Produk Hukum	3	RM	25.1	Memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah untuk memastikan rancangan produk hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku	Jumlah rancangan produk hukum pemerintah daerah yang telah mendapatkan pendampingan hukum dan dinyatakan sesuai dengan peraturan yang berlaku	12 Laporan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
						Crr	25.1	Memanfaatkan teknologi aplikasi MONDAY dan SAPA HUKUM untuk membantu proses review dan analisis dokumen hukum	Presentase tingkat adopsi teknologi MONDAY dan SAPA HUKUM dalam proses review dan analisis dokumen hukum mencapai ≥90% dari total dokumen yang direview dalam satu periode	95%	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
12.1	Keterbatasan SDM atau infrastruktur pendukung	10	12	Jumlah pelayanan publik AHU kepada masyarakat yang terlambat	1	Prv	12.1	Memberikan pelatihan berkala untuk meningkatkan kompetensi	Jumlah pelatihan yang diselenggarakan dalam satu tahun untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam pengendalian risiko	1 dokumen	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
29.1	Kurangnya tenaga ahli atau staf yang kompeten dalam pengelolaan sistem informasi hukum	10			1	Prv	29.1	Menyelenggarakan pelatihan khusus untuk staf dalam pengelolaan sistem informasi hukum	Jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan dalam pengelolaan sistem informasi hukum	1 Laporan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
38.1	Kurangnya sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan anggaran	10			1	Prv	38.1	Melakukan audit internal dan eksternal secara berkala	Jumlah audit internal dan eksternal yang dilakukan secara berkala dalam satu tahun untuk memastikan efektivitas anggaran JDIHN untuk kepentingan pribadi atau kelompok	1 Laporan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
39.1	Belum berjalannya sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dan aman	10	15	Jumlah pungutan liar atau praktik korupsi dalam proses pemberian bantuan hukum	1	Prv	39.1	Melakukan pengawasan monitoring dan evaluasi pada pelayanan pengaduan serta melakukan sosialisasi tata cara penyampaian pengaduan	Jumlah kegiatan pengawasan, monitoring, evaluasi dan sosialisasi tata cara penyampaian pengaduan yang dilaksanakan dalam satu tahun	4 laporan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
40.1	Belum berjalannya sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dan aman	10	16	Jumlah pungutan liar atau praktik korupsi dalam proses pemberian bantuan hukum	1	Prv	40.1	Melakukan pengawasan monitoring dan evaluasi pada pelayanan pengaduan serta melakukan sosialisasi tata cara penyampaian pengaduan	Jumlah kegiatan pengawasan, monitoring, evaluasi dan sosialisasi tata cara penyampaian pengaduan yang dilaksanakan dalam satu tahun	4 laporan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
41.1	Tidak adanya sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dan aman	10	17	Jumlah pungutan liar atau praktik korupsi dalam pelaksanaan program	1	Prv	41.1	Melakukan pengawasan monitoring dan evaluasi pada pelayanan pengaduan serta melakukan sosialisasi tata cara penyampaian pengaduan	Jumlah kegiatan pengawasan, monitoring, evaluasi dan sosialisasi tata cara penyampaian pengaduan yang dilaksanakan dalam satu tahun	4 laporan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
1.1	Sistem keamanan yang kurang memadai	9	18	Jumlah kejadian upaya peretasan aplikasi, media sosial	3	Prv	1.1	Memperbarui sistem keamanan IT, termasuk firewall dan enkripsi data	Presentase keberhasilan penggunaan sistem keamanan Firewall dan enkripsi data	90%	Ka Kanwil
1.2	Terjadinya kelalain pegawai pemegang akun media sosial kanwil	9	19	Jumlah kejadian upaya peretasan aplikasi, media sosial	3	Prv	1.2	Menyusun SOP yang jelas untuk pengelolaan akun media sosial	Jumlah SOP untuk pengelolaan akun media sosial	1 Dokumen	Ka Kanwil
7.1	Kurangnya pengawasan dalam penyerapan anggaran	9	20	Jumlah penyalahgunaan anggaran dengan penggunaan dana untuk keperluan pribadi atau di luar tujuan program	3	Prv	7.1	Mewajibkan pelaporan berkala tentang penyerapan anggaran	Jumlah pelaporan tentang penyerapan anggaran	4 Laporan	Ka Kanwil

7.2	Pengelolaan anggaran yang tidak transparan	9	21	Jumlah penyalahgunaan anggaran dengan penggunaan dana untuk keperluan pribadi atau di luar tujuan program	3	Prv 7.2	Mengimplementasikan sistem terbuka untuk pengelolaan anggaran	Jumlah dokumen pengelolaan anggaran	4 Dokumen	Ka Kanwil
2.1	Keterbatasan kapasitas penyimpanan server	8	22	Jumlah penyimpanan data pada server lokal yang tidak terbackup	5	Prv 2.1	Menerapkan manajemen data yang efektif untuk mengoptimalkan penyimpanan	Jumlah penyimpanan data yang telah di backup	2 Dokumen	Ka Kanwil
13.1	Kurangnya kesadaran masyarakat terkait kriteria Kekayaan Intelektual	8	23	Jumlah masyarakat yang belum mendaftarkan produknya pada kekayaan intelektual	5	Prv 13.1	Melakukan kampanye sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya Kekayaan Intelektual (KI)	Jumlah kegiatan sosialisasi terkait pentingnya Kekayaan Intelektual kepada Masyarakat	4 Kegiatan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
16.1	Informasi Kekayaan Intelektual belum menjangkau tempat/wilayah yang berpotensi menghasilkan produk Kekayaan Intelektual	8	24	Jumlah masyarakat yang belum mendaftarkan produknya pada kekayaan intelektual	5	Prv 16.1	Mengadakan roadshow dan workshop di daerah-daerah potensial	Jumlah kegiatan workshop dan roadshow ke daerah yang potensial dan minim pendaftaran KI	4 Laporan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
23.1	Penanganan kasus pelanggaran KI yang tidak efektif	8	25	Jumlah pelanggaran KI	5	Prv 23.1	Memberikan pelatihan khusus untuk penanganan kasus KI	Jumlah pelatihan yang diselenggarakan untuk penanganan kasus pelanggaran Kekayaan Intelektual	2 Kegiatan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
27.1	Beban kerja yang tinggi atau antrean produk hukum yang harus dievaluasi.	8	26	Jumlah produk hukum yang dihasilkan mengandung kelebihan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	1	Prv 27.1	Menyeimbangkan distribusi tugas antar tim	Jumlah produk hukum yang telah dievaluasi karena ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan	1 Laporan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
4.1	Jumlah SDM di bidang kehumasan tidak memadai	6	27	Jumlah kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM)	1	Prv 4.1	Merekrut staf tambahan untuk bidang kehumasan	Jumlah tambahan staf di bidang kehumasan	1 Dokumen	Ka Kanwil
6.1	Kurangnya verifikasi dan validasi data	6	28	Jumlah data dan laporan yang dilakukan manipulasi	3	Prv 6.1	Mengimplementasikan sistem verifikasi dan validasi data yang ketat	Jumlah data pelaporan yang tervalidasi dan tidak terdapat unsur manipulasi	1 Dokumen	Ka Kanwil
8.1	Kualifikasi penyedia tidak memenuhi syarat dan Calon	6	29	Jumlah Tender pengadaan Barang dan Jasa yang gagal	2	Prv 8.1	Melakukan verifikasi ketat terhadap kualifikasi penyedia	Jumlah tender pengadaan barang dan jasa dari penyedia yang telah terverifikasi kualitasnya	1 Dokumen	Kabag TU Umum
9.1	Kendala pengajuan SPM anataran human error, indikasi fraud, dan lamanya data dukung dari pihak pengelola dan pihak ketiga	6	30	Jumlah anggaran yang tidak terserap	1	Prv 9.1	Memberikan pelatihan tentang prosedur pengajuan SPM	Jumlah pelatihan terkait SOP Pengajuan SPM	1 Laporan	Kabag TU Umum
11.1	Perencanaan anggaran yang tidak realistik atau tidak sesuai dengan kebutuhan program	6	31	Jumlah kegiatan yang tidak terlaksana	1	Prv 11.1	Melakukan analisis kebutuhan yang mendalam sebelum menyusun anggaran	Jumlah dokumen analisa kebutuhan yang diidentifikasi sebelum melakukan penyusunan anggaran	1 Dokumen	Ka Kanwil
11.2	Perubahan kebijakan atau prioritas yang memengaruhi alokasi anggaran	6	32	Jumlah kegiatan yang tidak terlaksana	1	Prv 11.2	Berkordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengantisipasi perubahan kebijakan	Jumlah kegiatan kordinasi dengan pemerintah pusat terkait adanya perubahan kebijakan	4 Laporan	Ka Kanwil
17.1	Standar waktu proses yang telah ditetapkan (seperti waktu pemeriksaan substantif atau penerbitan sertifikat) mungkin tidak dapat dipenuhi karena lonjakan permohonan	6	33	Jumlah proses pendaftaran kekayaan intelektual yang tidak selesai sesuai standar proses	3	Prv 17.1	Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran merek dagang	Jumlah sosialisasi terkait pentingnya pendaftaran merek dagang kepada masyarakat	1 dokumen	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
19.1	Kurangnya pengawasan terhadap dokumen yang diajukan	6	34	Jumlah proses penyelesaian pengaduan yang dimanipulasi	3	Prv 19.1	Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan pemerintah daerah	Jumlah rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam penyelesaian pengaduan	4 Kegiatan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
20.1	Kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan keuangan	6	35	Jumlah ketidakakuratan laporan keuangan terkait pelaporan PNBP AHU	3	Prv 20.1	Menerapkan sistem reward and punishment untuk mendorong integritas	Jumlah kegiatan pelatihan pelaporan keuangan dalam pengelolaan PNBP AHU	2 Laporan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
21.1	Kurangnya alokasi anggaran khusus untuk penanganan pengaduan	6	36	Jumlah kurangnya biaya yang dibutuhkan untuk proses pengaduan masyarakat	3	Prv 21.1	Melakukan analisis kebutuhan yang mendalam sebelum menyusun anggaran	Jumlah kebutuhan yang di analisa sebelum melakukan penyusunan anggaran	3 Dokumen	Kepala Divisi Pelayanan Hukum

22.1	Kekayaan Intelektual yang disebabkan oleh ketidaktauhan masyarakat	6	37	Jumlah biaya tambahan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat	3	Prv 22.1	Menyederhanakan proses birokrasi untuk mempercepat pencairan dana	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan pada masyarakat untuk menekan tingginya presentase pelanggaran KI	2 Kegiatan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
24.1	tidak mencukupi untuk menangani peningkatan permohonan	6	38	Jumlah proses permohonan KI yang belum diselesaikan	3	Prv 24.1	Menambah staf tambahan dan meningkatkan kapasitas sistem	Jumlah staff yang ditambah untuk membantu menyelesaikan permohonan KI dan meningkatkan kapasitas sistem	1 Dokumen	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
32.1	Kurangnya koordinasi antara Kanwil Kemenkum dengan pemerintahan daerah atau des	6	39	Jumlah program peningkatan sadar hukum di desa binaan yang tidak memenuhi target	3	Prv 32.1	Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan pemerintah daerah	Jumlah rapat koordinasi rutin dengan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan desa binaan sadar hukum	6 Kegiatan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
34.1	Kanwil dengan pihak eksternal (pemerintah daerah) untuk menguntungkan kepentingan tertentu dalam proses	6	40	Jumlah kolusi dengan Pihak Eksternal	1	Prv 34.1	Mengimplementasikan sistem pengawasan yang ketat	Jumlah sistem pengawasan yang telah diterapkan untuk menekan kemungkinan terjadinya praktik kolusi	2 Laporan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
35.1	Kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan.	6	41	Jumlah pengalihan dana untuk keperluan pribadi atau kegiatan lain	1	Prv 35.1	Mempublikasikan laporan keuangan secara berkala	Jumlah laporan keuangan yang telah dipublikasikan ke publik	1 Laporan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
36.1	Budaya organisasi yang kurang mendukung integritas dan akuntabilitas	6	42	Jumlah dokumen palsu atau tidak lengkap yang disertakan dalam proses evaluasi untuk mempermudah pengesahan produk hukum	3	Prv 36.1	Menerapkan sistem reward and punishment untuk mendorong integritas	Jumlah pegawai pelayanan yang telah diberikan reward and punishment dalam upaya mempermudah pengesahan produk hukum	11 Pegawai	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
37.1	Budaya organisasi yang kurang mendukung integritas dan akuntabilitas	6	43	Jumlah dokumen palsu atau tidak lengkap yang disertakan dalam proses fasilitasi untuk mempermudah pengesahan peraturan daerah	3	Prv 37.1	Menerapkan sistem reward and punishment untuk mendorong integritas	Jumlah pegawai pelayanan yang telah diberikan reward and punishment dalam upaya mempermudah pengesahan peraturan daerah	12 Pegawai	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
42.1	Lemahnya sistem pengawasan internal	6	44	Jumlah penyalahgunaan wewenang oleh oknum petugas	3	Prv 42.1	Melakukan audit internal secara berkala	Jumlah audit yang dilakukan secara berkala	1 Kegiatan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
43.1	Risiko pengelolaan anggaran yang tidak efektif dan efisien dalam kegiatan fasilitasi rancangan produk hukum,	6	45	Jumlah Anggaran yang Tidak Efisien	1	Prv 43.1	Memberikan pelatihan khusus tentang pengelolaan anggaran	Jumlah pelatihan terkait pengelolaan penganggaran	2 Kegiatan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
44.1	Kurangnya kapasitas staf dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan anggaran	6	46	Jumlah penyimpangan atau defisit anggaran	3	Prv 44.1	Memberikan pelatihan khusus tentang pengelolaan keuangan	Jumlah pelatihan terkait pengelolaan keuangan	2 Kegiatan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
45.1	Proses administrasi keuangan yang rumit dan lambat.	6	47	Jumlah penyimpangan atau defisit	1	Prv 45.1	Menyederhanakan proses administrasi keuangan	Jumlah proses administrasi keuangan yang ditangani secara cepat	2 Laporan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum



Langkah 6: Pemantauan dan Reviu

Unit Pemlik Risiko: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta
Periode Penerapan: 2025

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	KRI / Indikator Utama Risiko	Toleransi Risiko	Risiko yang terjadi (risk exposure)	Risiko terjadi - Toleransi Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan (eksekusi)	KCV Indikator Pengendalian Risiko	Penanggung Jawab	Target	Realisasi	Kinerja Pengendalian Risiko	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28.1	Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam memberikan fasilitasi perencanaan peraturan daerah	16	Jumlah fasilitasi perencanaan peraturan daerah tidak selesa terbatas waktu, menyebabkan penundaan dalam penyusunan atau pengesahan peraturan daerah	5			28.1 Melakukan penyederhana proses yang rumit untuk mengurangi beban kerja SDM dengan memanfaatkan Aplikasi MONDAY dan SAPA HUKUM	Jumlah pemanfaatan aplikasi MONDAY dan SAPA HUKUM dalam menjalankan tugas dan pesantese keberhasilan tingkat adopsi aplikasi MONDAY dan SAPA HUKUM	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	2 dokumen				Dilakukan pada setiap periode bulan
5.1	Rendahnya integritas petugas pelayanan	15	Jumlah penerimaan gratifikasi dalam memberikan pelayanan	3			5.1 Jumlah petugas yang telah memandatangani komitmen terhadap kode etik dan praktik integritas	Jumlah petugas yang telah memandatangani komitmen terhadap kode etik dan praktik integritas	Ka Kanwil	1 Laporan				Dilakukan pada periode B03
14.1	Efisiensi anggaran yang harus menerapkan sistem WFH/WFO	15	Jumlah penganggaran yang kurang optimal, terbatas dengan waktu yang diperlukan untuk menanggapi pengaduan masyarakat terkait layanan AHU	3			14.1 Menggunakan fitur Live pada aplikasi Instagram dan TikTok untuk masyarakat yang ingin bertanya secara online dan media what'sapp sebagai layanan secara elektronik	Jumlah pelayanan online dan frekuensi live setiap sesi	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	12 Laporan				Dilakukan setiap minggu 1 kali pada hari / jam kerja
15.1	Penyelesaian laporan pengaduan terkait notaris yang tidak tuntas atau tidak memenuhi standar prosedur yang berlaku	15	Jumlah penganggaran yang kurang optimal, terbatas dengan waktu yang diperlukan untuk menanggapi pengaduan masyarakat terkait pelanggaran perlaku dan pelaksanaan jabatan notaris	3			15.1 Monitoring dan evaluasi berkala terhadap proses penanganan pengaduan notaris untuk memastikan perbaikan yang dilakukan efektif dengan memanfaatkan aplikasi SIEMON	Jumlah pengaduan yang dipantau secara berkala dan dievaluasi setiap dengan standar operasional prosedur (SOP) melalui Aplikasi SIEMON	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	12 Laporan				Dilakukan pada setiap periode bulan
18.1	Kurangnya pahaman masyarakat terkait alur mekanisme dan prosedur terkait layanan AHU	15	Jumlah pungutan lar atau biaya tambahan yang tidak resmi yang diminta dari masyarakat atau pelaku usaha	3			18.1 Menyediakan panduan layanan di loket layanan, website, atau media sosial	Jumlah unit layanan yang menyediakan panduan layanan secara lengkap di loket layanan/website/ atau media sosial	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	1 Dokumen				Dilakukan pada setiap hari pada jam kerja
30.1	Pernyataan bantuan hukum litigasi yang melebihi kapasitas layanan	15	Jumlah bantuan hukum litigasi kepada pemohon yang terlambat	3			30.1 Memperbaiki kolaborasi dengan lembaga lain seperti LBH atau pergunungan tinggi untuk berbagi beban kasus	Jumlah perjanjian kerja sama (MoU) atau kegiatan kolaboratif yang terjalin dengan lembaga bantuan hukum (LBH) atau pergunungan tinggi dalam satuh	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	4 Kegiatan				Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10
31.1	Pernyataan bantuan hukum non litigasi yang melebihi kapasitas layanan	15	Jumlah bantuan hukum non litigasi kepada pemohon yang terlambat	3			31.1 Memperbaiki kolaborasi dengan lembaga lain seperti LBH atau pergunungan tinggi untuk berbagi beban kasus	Jumlah perjanjian kerja sama (MoU) atau kegiatan kolaboratif yang terjalin dengan lembaga bantuan hukum (LBH) atau pergunungan tinggi dalam satuh	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	4 Kegiatan				Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B11
33.1	Kurangnya pelatihan dan pembinaan bagi petugas pelayanan	15	Jumlah pelatihan yang buruk atau tidak memenuhi	3			33.1 Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja petugas untuk meningkatkan kinerja petugas secara pelatihan	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan evaluasi berkala terhadap peningkatan kinerja petugas secara pelatihan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	1 Kegiatan				Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B12
3.1	Keterbatasan bandwidth dari pusdatin	12	Jumlah gangguan jaringan yang sering terjadi	5			3.1 Melakukan koordinasi rutin dengan Pusdatin untuk memastikan ketersediaan dan keandalan bandwidth	Jumlah kegiatan koordinasi rutin dengan Pusdatin untuk memastikan ketersediaan dan keandalan bandwidth	Ka Kanwil	1 Laporan				Dilakukan 1 kali dalam 1 tahun
10.1	Petugas laju mencatat BMN yang dikuasai pegawai, atau salah input data	12	Jumlah BMN yang hilang	5			10.1 Melakukan pengawasan dan monitoring secara real-time dengan memanfaatkan penerapan teknologi aplikasi TEBAS BMN	Jumlah kegiatan pelaksanaan pengawasan dan monitoring real-time melalui aplikasi TEBAS BMN terhadap total aset yang diberi	Kabag TU Umum	4 laporan				Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10
25.1	Risiko keterlambatan dalam penyusunan, review, atau pengesahan rencana produk hukum di daerah karena belum kerja yang singg, kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, atau koordinasi yang kurang efektif antara Kanwil dan pemerintah daerah	12	Jumlah keterlambatan Penyelesaian Produk Hukum	3			25.1 Memanfaatkan teknologi aplikasi MONDAY dan SAPA HUKUM untuk membantu proses review dan analisis dokumen hukum	Jumlah rancangan produk hukum pemerintah daerah yang telah mendapatkan pendampingan hukum dan dinyatakan sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui aplikasi MONDAY dan SAPA HUKUM	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	1 Dokumen				dilakukan pada Periode B09
12.1	Keterbatasan SDM atau infrastruktur pendukung	10	Jumlah pelayanan publik AHU kepada masyarakat yang terlambat	1			12.1 Memberikan pelatihan berkala untuk meningkatkan kompetensi	Jumlah pelatihan yang diselenggarakan dalam satuh untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam pengendalian risiko	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	1 dokumen				dilakukan pada Periode B06
29.1	Kurangnya tenaga ahli atau staf yang kompeten dalam pengelolaan sistem informasi hukum	10	Jumlah layanan dengan standar yang ditetapkan oleh JDHN yang tidak sesuai	1			29.1 Menyelenggarakan pelatihan khusus untuk staf dalam pengelolaan sistem informasi hukum	Jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan dalam pengelolaan sistem informasi hukum	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	1 Laporan				dilakukan pada Periode B06
38.1	Kurangnya sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan anggaran	10	Jumlah pengalihan anggaran JDHN untuk kepentingan pribadi atau kelompok	1			38.1 Melakukan audit internal dan eksternal secara berkala	Jumlah audit internal dan eksternal yang dilakukan secara berkala dalam satuh untuk memastikan efektivitas anggaran JDHN untuk kepentingan pribadi atau kelompok	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	1 Laporan				dilakukan pada Periode B12
39.1	Batum berjalanannya sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dan aman	10	Jumlah pungutan lar atau praktik korupsi dalam proses pemberian bantuan hukum	1			39.1 Melakukan pengawasan monitoring dan evaluasi pada pelaporan pengaduan serta melakukan sosialisasi tata cara penyampaian pengaduan	Jumlah kegiatan pengawasan, monitoring, evaluasi dan sosialisasi tata cara penyampaian pengaduan yang dilaksanakan dalam satuh	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	4 laporan				Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10
40.1	Batum berjalanannya sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dan aman	10	Jumlah pungutan lar atau praktik korupsi dalam proses pemberian bantuan hukum	1			40.1 Melakukan pengawasan monitoring dan evaluasi pada pelaporan pengaduan serta melakukan sosialisasi tata cara penyampaian pengaduan	Jumlah kegiatan pengawasan, monitoring, evaluasi dan sosialisasi tata cara penyampaian pengaduan yang dilaksanakan dalam satuh	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	4 laporan				Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10
41.1	Tidak adanya sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dan aman	10	Jumlah pungutan lar atau praktik korupsi dalam pelaksanaan program	1			41.1 Melakukan pengawasan monitoring dan evaluasi pada pelaporan pengaduan serta melakukan sosialisasi tata cara penyampaian pengaduan	Jumlah kegiatan pengawasan, monitoring, evaluasi dan sosialisasi tata cara penyampaian pengaduan yang dilaksanakan dalam satuh	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	4 laporan				Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10
1.1	Sistem keamanan yang kurang memadai	9	Jumlah kejadian upaya peretasan aplikasi, akun media sosial kanwil	3			1.1 Memperbaiki sistem keamanan IT, termasuk firewall dan ekripsi data	Persentase keberhasilan penggunaan sistem keamanan Firewall dan ekripsi data	Ka Kanwil	90%				dilakukan pada Periode B12
1.2	Tetradinya kelainan pegawai pemegang akun media sosial kanwil	9	Jumlah kejadian upaya peretasan aplikasi, media sosial	3			1.2 Menyusun SOP yang jelas untuk pengelolaan akun media sosial	Jumlah SOP untuk pengelolaan akun media sosial	Ka Kanwil	1 Dokumen				dilakukan pada Periode B03
7.1	Kurangnya pengawasan dalam penyerapan anggaran	9	Jumlah pengalihan anggaran dengan penggunaan dana untuk keperluan pribadi atau di luar tujuan program	3			7.1 Mewajibkan pelaporan berkala tentang penyerapan anggaran	Jumlah pelaporan tentang penyerapan anggaran	Ka Kanwil	4 Laporan				Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10
7.2	Pengelolaan anggaran yang tidak transparan	9	Jumlah pengalihan anggaran dengan penggunaan dana untuk keperluan pribadi atau di luar tujuan program	3			7.2 Mengimplementasikan sistem terbuka untuk pengelolaan anggaran	Jumlah dokumen pengelolaan anggaran	Ka Kanwil	4 Dokumen				Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10
2.1	Keterbatasan kapasitas penyimpanan server	8	Jumlah penyimpanan data pada server lokal yang tidak terback up	5			2.1 Menerapkan manajemen data yang efektif untuk mengoptimalkan penyimpanan	Jumlah penyimpanan data yang telah di backup	Ka Kanwil	2 Dokumen				dilakukan pada B09 dan B12
13.1	Kurangnya kesadaran masyarakat terkait kriteria Kekayaan Intelektual	8	Jumlah masyarakat yang belum mendafarkan produksinya pada kekayaan intelektual	5			13.1 Melakukan kampanye sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya Kekayaan Intelektual (KI)	Jumlah kegiatan sosialisasi terkait pentingnya Kekayaan Intelektual kepada Masyarakat	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	4 Kegiatan				Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10
16.1	Informasi Kekayaan Intelektual belum menjangkau tempat/wilayah yang berpotensi menghasilkan produk Kekayaan Intelektual	8	Jumlah masyarakat yang belum mendafarkan produksinya pada kekayaan intelektual	5			16.1 Mengadakan roadshow dan workshop di daerah-darah potensial	Jumlah kegiatan workshop dan roadshow ke daerah yang potensial dan minim pendaftaran KI	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	4 Laporan				Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10
23.1	Penanganan kasus pelanggaran KI yang tidak efektif	8	Jumlah pelanggaran KI	5			23.1 Memberikan pelatihan khusus untuk penanganan kasus KI	Jumlah pelatihan yang diselenggarakan untuk penanganan kasus pelanggaran Kekayaan Intelektual	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	2 Kegiatan				dilakukan pada B06 dan B 09
27.1	Beban kerja yang tinggi atau antrean produk hukum yang harus dievaluasi.	8	Jumlah produk hukum yang diberikan kelebihan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	1			27.1 Mereimbangkan distribusi tugas antar tim	Jumlah produk hukum yang telah dievaluasi karena ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	1 Laporan				Dilakukan 1 kali dalam satu periode
4.1	Jumlah SDM di bidang kehumasan tidak memadai	6	Jumlah kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM)	1			4.1 Merekrut staf tambahan untuk bidang kehumasan	Jumlah tambahan staf di bidang kehumasan	Ka Kanwil	1 Dokumen				Dilakukan 1 kali dalam satu periode
6.1	Kurangnya verifikasi dan validasi data manipulasi	6	Jumlah data dan laporan yang dilakukan	3			6.1 Mengimplementasikan sistem verifikasi dan validasi data yang ketat	Jumlah data pelaporan yang tervalidasi dan tidak terdapat unsur manipulasi	Ka Kanwil	1 Dokumen				Dilakukan 1 kali dalam satu periode
8.1	Kualifikasi penyedia tidak memenuhi syarat dan Calon Penyedia tidak hadir dalam Undangan Klasifikasi administrasi dan Teknis	6	Jumlah Tender pengadaan Barang dan Jasa yang gagal	2			8.1 Melakukan verifikasi ketat terhadap kualifikasi penyedia	Jumlah tender pengadaan barang dan jasa dari penyedia yang telah terverifikasi kualitasnya	Kabag TU Umum	1 Dokumen				Dilakukan 1 kali dalam satu periode

9.1	Kendala pengajuan SPM anataran human error, indikasi fraud, dan lamanya data dukung dari pihak pengelola dan pihak ketiga	6	Jumlah anggaran yang tidak terserap	1			9.1	Memberikan pelatihan tentang prosedur pengajuan SPM	Jumlah pelatihan terkait SOP Pengajuan SPM	Kabag TU Umum	1 Laporan			pelaksanaan tentatif satu periode
11.1	Perencanaan anggaran yang tidak realistik atau tidak sesuai dengan kebutuhan program		Jumlah kegiatan yang tidak terlaksana	1			11.1	Melakukan analisis kebutuhan yang mendalam sebelum menyusun anggaran	Jumlah dokumentasi analisis kebutuhan yang diidentifikasi sebelum melakukan penyusunan anggaran	Ka Kanwil	1 Dokumen			Dilakukan pada periode B09
11.2	Perubahan kebijakan atau prioritas yang memengaruhi alokasi anggaran	6	Jumlah kegiatan yang tidak terlaksana	1			11.2	Berkordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengantisipasi perubahan kebijakan	Jumlah kegiatan kordinasi dengan pemerintah pusat terkait adanya perubahan kebijakan	Ka Kanwil	4 Laporan			Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10
17.1	Standar waktu proses yang telah ditetapkan (seperti waktu pemeriksaan substantif atau penerbitan sertifikat) mungkin tidak dapat dipenuhi karena lonjakan permohonan		Jumlah proses pendaftaran kekayaan intelektual yang tidak selesai sesuai standar proses	3			17.1	Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran merek dagang	Jumlah sosialisasi terkait pentingnya pendaftaran merek dagang kepada masyarakat	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	1 dokumen			
19.1	Kurangnya pengawasan terhadap dokumen yang diajukan	6	Jumlah proses penyelesaian pengaduan yang dimanipulasi	3			19.1	Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan pemerintah daerah	Jumlah rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam penyelesaian pengaduan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	4 Kegiatan			Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10
20.1	Kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan keuangan		Jumlah ketidakakuratan laporan keuangan terkait pelaporan PNBP AHU	3			20.1	Menerapkan sistem reward and punishment untuk mendorong integritas	Jumlah kegiatan pelatihan pelaporan keuangan dalam pengelolaan PNBP AHU	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	2 Laporan			dilakukan pada B06 dan B 09
21.1	Kurangnya alokasi anggaran khusus untuk penanganan pengaduan	6	Jumlah kurangnya biaya yang dibutuhkan untuk proses pengaduan masyarakat	3			21.1	Melakukan analisis kebutuhan yang mendalam sebelum menyusun anggaran	Jumlah kebutuhan yang di analisa sebelum melakukan penyusunan anggaran	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	3 Dokumen			Dilakukan pada periode B06 s.d B12
22.1	Tingginya angka pelanggaran Kekayaan Intelektual yang disebabkan oleh ketidaktahtuan masyarakat		Jumlah biaya tambahan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat	3			22.1	Menyederhanakan proses birokrasi untuk mempercepat pencairan dana	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan pada masyarakat untuk menekan tingginya presentase pelanggaran KI	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	2 Kegiatan			dilakukan pada B06 dan B 09
24.1	Kapasitas staf dan sistem yang tidak mencukupi untuk menangani peningkatan permohonan	6	Jumlah proses permohonan KI yang belum diselesaikan	3			24.1	Menambah staf tambahan dan meningkatkan kapasitas sistem	Jumlah staff yang ditambah untuk membantu menyelesaikan permohonan KI dan meningkatkan kapasitas sistem	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	1 Dokumen			dilakukan 1 kali periode dalam setahun
32.1	Kurangnya koordinasi antara Kanwil Kemenkumham dengan pemerintahan daerah atau desa	6	Jumlah program peningkatan sadar hukum di desa binaan yang tidak memenuhi target	3			32.1	Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan pemerintah daerah	Jumlah rapat koordinasi rutin dengan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan desa binaan sadar hukum	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	6 Kegiatan			Dilakukan tiap 2 bulan sekali
34.1	Risiko kolusi antara pejabat Kanwil dengan bihak eksternal (pemerintah daerah) untuk menguntungkan kepentingan tertentu dalam proses penyusunan produk hukum.	6	Jumlah kolusi dengan Pihak Eksternal	1			34.1	Mengimplementasikan sistem pengawasan yang ketat	Jumlah sistem pengawasan yang telah diterapkan untuk menekan kemungkinan terjadinya praktik kolusi	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	2 Laporan			Dilakukan pada B03 dan B12
35.1	Kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan.		Jumlah pengalihan dana untuk keperluan pribadi atau kegiatan lain	1			35.1	Mempublikasikan laporan keuangan secara berkala	Jumlah laporan keuangan yang telah dipublikasikan ke publik	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	1 Laporan			Dilakukan pada Periode B12
36.1	Budaya organisasi yang kurang mendukung integritas dan akuntabilitas	6	Jumlah dokumen palsu atau tidak lengkap yang disertakan dalam proses evaluasi untuk mempermudah pengesahan produk hukum	3			36.1	Menerapkan sistem reward and punishment untuk mendorong integritas	Jumlah pegawai pelanggaran yang telah diberikan reward and punishment dalam upaya mempermudah pengesahan produk hukum	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	12 Pegawai			Dilakukan setiap periode bulan berjalan
37.1	Budaya organisasi yang kurang mendukung integritas dan akuntabilitas		Jumlah dokumen palsu atau tidak lengkap yang disertakan dalam proses fasilitasi untuk mempermudah pengesahan peraturan daerah	3			37.1	Menerapkan sistem reward and punishment untuk mendorong integritas	Jumlah pegawai pelanggaran yang telah diberikan reward and punishment dalam upaya mempermudah pengesahan peraturan daerah	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	12 Pegawai			Dilakukan setiap periode bulan berjalan
42.1	Lemahnya sistem pengawasan internal	6	Jumlah penyalahgunaan wewenang oleh oknum petugas	3			42.1	Melakukan audit internal secara berkala	Jumlah audit yang dilakukan secara berkala	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	1 Kegiatan			Dilakukan pada Periode B12
43.1	Risiko pengelolaan anggaran yang tidak efektif dan efisien dalam kegiatan fasilitasi rancangan produk hukum, seperti pembiorosan atau alokasi dana yang tidak tepat sasaran.		Jumlah Anggaran yang Tidak Efisien	1			43.1	Memberikan pelatihan khusus tentang pengelolaan anggaran	Jumlah pelatihan terkait pengelolaan penganggaran	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	2 Kegiatan			Dilakukan pada setiap semester
44.1	Pengangguran kapasitas staf dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan anggaran	6	Jumlah penyimpangan atau defisit anggaran	3			44.1	Memberikan pelatihan khusus tentang pengelolaan keuangan	Jumlah pelatihan terkait pengelolaan keuangan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	2 Kegiatan			Dilakukan pada setiap semester
45.1	Proses administrasi keuangan yang rumit dan lambat.		Jumlah penyimpangan atau defisit	1			45.1	Menyederhanakan proses administrasi keuangan	Jumlah proses administrasi keuangan yang ditangani secara cepat	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	2 Laporan			Dilakukan pada periode bersangkutan

CATATAN:

Kolom (1): Dili. dengan kode urut potensi penyebab Risiko;

Kolom (2): Dili. dengan potensi penyebab Risiko yang diambil dari hasil Tahap II Pedoman Penetapan Konteks Risiko. Potensi

Kolom (3): Dili. dengan tingkat dan profil Risiko berdasarkan langkah 2.1. Tahap II Pedoman Penilaian Risiko;

Kolom (4): Dili. dengan indikator Risiko utama yang merupakan ukuran terjadinya Risiko berdasarkan langkah 2.1. Tahap II

Kolom (5): Dili. dengan toleransi Risiko, berdasarkan langkah 2.1 Tahap II Pedoman Penilaian Risiko;

Kolom (6): Dili. dengan Risiko yang terjadi;

Kolom (7): Dili. dengan perhitungan antara (Risiko Terjadi – Toleransi Risiko);



Matrik Pemantauan dan Reviu Resiko

Unit Penilikil Risiko: Periode Penerapan															Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istiwama Yogyakarta	
Kode	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	KRI/Indikator Utama Risiko	Toleransi Risiko	Risikoyang terjadi - risiko	Toleransi Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan (eksekusi)	KCI/Indikator Pengendalian Risiko	Penanggung Jawab	Target	Realisasi	Kinerja Pengendalian	Keterangan	Link Data Dukung		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
28.1	Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam memberikan fasilitasi perencanaan peraturan daerah	16	Jumlah fasilitasi perencanaan peraturan daerah tidak	5	5	0	28.1	Melakukan perenahanan proses yang rumit untuk mengurangi beban kerja SDM dengan memanfaatkan Aplikasi MONDAY dan SAPA HUKUM	Jumlah pemanfaatan aplikasi MONDAY dan SAPA HUKUM dalam melaksanakan tugas dan pesantren keberhasilan tingkat adopsi aplikasi MONDAY dan SAPA HUKUM	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	2 dokumen	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10	https://drive.google.com/drive/folders/1n0fU2zEYFnWt12_kUHgBixjKGAmK/us?usp=sharing	
5.1	Rendahnya integritas petugas pelayanan	15	Jumlah petugas pelayanan	3	0	-3	5.1	Senjata pengendalian risiko yang dilaksanakan berdasarkan kredibilitas dan potensi integritas	Jumlah petugas yang telah memantau dan komitmen berkoordinasi kredibel dan pada intigrasi	Ka Kanwil	1 Laporan	Telah dilaksanakan	100%	Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10	https://drive.google.com/drive/folders/1n0fU2zEYFnWt12_kUHgBixjKGAmK/us?usp=sharing	
14.1	Efektivitas anggaran yang harus menerapkan sistem WFWHFO	15	Jumlah penanganan	3	0	-3	14.1	Mengangkat file Live pada aplikasi Instagram dan TikTok untuk masyarakat yang lebih banyak	Jumlah pelayanan online dan kreativitas berkoordinasi live setiap sesi	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	12 Laporan	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan setiap minggu 1 kali pada hari jum	https://drive.google.com/drive/folders/1n0fU2zEYFnWt12_kUHgBixjKGAmK/us?usp=sharing	
15.1	Penerapan laporan pengaduan terkait notaris yang tidak tuntas atau tidak memenuhi standar prosedur yang kurang	15	Jumlah penanganan	3	0	-3	15.1	Monitoring dan evaluasi berhadap proses penanganan pengaduan notaris untuk memastikan perbaikan yang dilakukan efektif dengan	Jumlah pengaduan yang dipantau secara berkala dan diselususn dengan standar operasional prosedur (SOP) melalui Aplikasi SIEMON	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	12 Laporan	Sedang dilaksanakan	100%	Dilakukan pada periode bulan	https://drive.google.com/drive/folders/1n0fU2zEYFnWt12_kUHgBixjKGAmK/us?usp=sharing	
18.1	Kurangnya pemahaman masyarakat akan akademik dan prosedur terkait layanan	15	Jumlah pemahaman masyarakat akan akademik dan prosedur terkait layanan	3	0	-3	18.1	Menyediakan panduan layanan di loket layanan, website, atau media sosial	Jumlah unit layanan yang menyediakan panduan layanan secara lengkap di loket layanan/website atau media sosial	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	1 Dokumen	Telah dilaksanakan	100%	Dilakukan pada setiap hari pada jam kerja	https://drive.google.com/drive/folders/1n0fU2zEYFnWt12_kUHgBixjKGAmK/us?usp=sharing	
30.1	Pemohonan bantuan hukum ilegal yang melibatkan pihak layanan	15	Jumlah bantuan hukum ilegal kepada pemohon	3	0	-3	30.1	Mempelajari kolaborasi dengan lembaga lain seperti LBH atau perguruan tinggi untuk berbagi beban kasus	Jumlah perjanjian kerja sama (MoU) atau kerjasama kolaboratif dengan lembaga lain untuk berbagi beban kasus	Kepala Divisi Peraturan Perundung-Undangan dan Pembinaan Hukum	4 Kegiatan	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10	https://drive.google.com/drive/folders/1n0fU2zEYFnWt12_kUHgBixjKGAmK/us?usp=sharing	
31.1	Pemohonan bantuan hukum non ilegal yang melibatkan lembaga layanan	15	Jumlah bantuan hukum non ilegal	3	0	-3	31.1	Mempelajari kolaborasi dengan lembaga lain seperti LBH atau perguruan tinggi untuk berbagi beban kasus	Jumlah perjanjian kerja sama (MoU) atau kerjasama kolaboratif dengan lembaga lain untuk berbagi beban kasus	Kepala Divisi Peraturan Perundung-Undangan dan Pembinaan Hukum	4 Kegiatan	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10	https://drive.google.com/drive/folders/1n0fU2zEYFnWt12_kUHgBixjKGAmK/us?usp=sharing	
33.1	Kurangnya pelistihan dan pembinaan bagi petugas pelayanan	15	Jumlah pelayanan yang	3	0	-3	33.1	Melakukan evaluasi berhadap kinerja kinerja petugas, untuk mendeklififikasi apakah pelatihan perlu	Jumlah kegiatan pelaksanaan evaluasi berhadap kinerja petugas, pasca pelatihan	Kepala Divisi Peraturan Perundung-Undangan dan Pembinaan Hukum	1 Kegiatan	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10	https://drive.google.com/drive/folders/1n0fU2zEYFnWt12_kUHgBixjKGAmK/us?usp=sharing	
3.1	Keterbatasan bandwidth di pusatdata	12	Jumlah gangguan pengiriman	5	5	0	3.1	Melakukan koordinasi rutin dengan Pusatdata untuk memastikan ketersediaan dan keandalan bandwidth	Jumlah kegiatan koordinasi rutin dengan Pusatdata untuk memastikan ketersediaan dan keandalan bandwidth	Ka Kanwil	1 Laporan	Telah dilaksanakan	100%	Dilakukan 1 kali dalam 1 tahun		
10.1	Petugas lain mencatat BMM yang dikenai pegawai, atau salah input data.	12	Jumlah BMM yang hilang	5	0	-5	10.1	Menilai pengawasan dan monitoring secara teknologi dengan memantauan penerapan teknologi	Jumlah perjanjian kerja sama (MoU) atau kerjasama kolaboratif dengan lembaga lain untuk berbagi beban kasus	Kabag TU Umum	4 laporan	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10	https://drive.google.com/drive/folders/1n0fU2zEYFnWt12_kUHgBixjKGAmK/us?usp=sharing	
25.1	Risiko ketelanjutan dalam penyusunan, review, atau pengesahan rancangan produk hukum di daerah karena kurangnya keterjangkaan teknologi dan efektivitas	12	Jumlah keterlambatan Penyelesaian Produk Hukum	3	3	0	25.1	Memanfaatkan teknologi aplikasi MONDAY dan SAPA HUKUM untuk membantu proses review dan analisis dokumen hukum	Jumlah rancangan produk hukum pemerintah daerah yang telah mendapatkan pendampingan hukum dan dinyatakan sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui aplikasi MONDAY dan SAPA HUKUM	Kepala Divisi Peraturan Perundung-Undangan dan Pembinaan Hukum	1 Dokumen	Sedang dilaksanakan	25%	dilakukan pada Periode B09		
12.1	Keterbatasan SDM atau infrastruktur pendukung	10	Jumlah pelayanan publik	1	1	0	12.1	Membentuk pelatihan berkala untuk meningkatkan kompetensi	Jumlah pelatihan yang diselenggarakan dalam satuan tahun untuk meningkatkan kompetensi pegawai	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	1 dokumen	Sedang dilaksanakan	75%	dilakukan pada Periode B06,B09,B10	https://drive.google.com/drive/folders/1n0fU2zEYFnWt12_kUHgBixjKGAmK/us?usp=sharing	
29.1	Kurangnya tenaga ahli staf yang kompeten dalam pengelolaan sistem informasi hukum	10	Jumlah layanan dengan standar yang tidak diterapkan	1	1	0	29.1	Menyelenggarakan pelatihan khusus untuk staf dalam pengelolaan sistem informasi hukum	Jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan dalam pengelolaan sistem informasi hukum	Kepala Divisi Peraturan Perundung-Undangan dan Pembinaan Hukum	1 Laporan	Sedang dilaksanakan	75%	dilakukan pada Periode B06		
36.1	Kurangnya sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan	10	Jumlah perbaikan	1	0	-1	36.1	Melakukan audit internal dan eksternal secara berkala	Jumlah audit internal dan eksternal untuk memastikan efektivitas	Kepala Divisi Peraturan Perundung-Undangan dan Pembinaan Hukum	1 Laporan	Sedang dilaksanakan	25%	dilakukan pada Periode B12		
39.1	Belum berjalannya sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dan aman	10	Jumlah pungutan liar atau praktik	1	0	-1	39.1	Melakukan pengawasan monitoring dan evaluasi pada pelaporan pengaduan serta melaksanakan	Jumlah kegiatan pengawasan, monitoring, evaluasi dan sosialisasi tata cara penyampaian pengaduan yang berlaku	Kepala Divisi Peraturan Perundung-Undangan dan Pembinaan Hukum	4 laporan	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10	https://drive.google.com/drive/folders/1n0fU2zEYFnWt12_kUHgBixjKGAmK/us?usp=sharing	
40.1	Belum berjalannya sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dan aman	10	Jumlah pungutan liar atau praktik	1	0	-1	40.1	Melakukan pengawasan monitoring dan evaluasi pada pelaporan pengaduan serta melaksanakan	Jumlah kegiatan pengawasan, monitoring, evaluasi dan sosialisasi tata cara penyampaian pengaduan yang berlaku	Kepala Divisi Peraturan Perundung-Undangan dan Pembinaan Hukum	4 laporan	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10	https://drive.google.com/drive/folders/1n0fU2zEYFnWt12_kUHgBixjKGAmK/us?usp=sharing	
41.1	Tidak adanya sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dan aman	10	Jumlah pungutan liar atau praktik	1	0	-1	41.1	Melakukan pengawasan monitoring dan evaluasi pada pelaporan pengaduan serta melaksanakan	Jumlah kegiatan pengawasan, monitoring, evaluasi dan sosialisasi tata cara penyampaian pengaduan yang berlaku	Kepala Divisi Peraturan Perundung-Undangan dan Pembinaan Hukum	4 laporan	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10	https://drive.google.com/drive/folders/1n0fU2zEYFnWt12_kUHgBixjKGAmK/us?usp=sharing	
4.1	Tidak adanya sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dan aman	10	Jumlah kejadian	3	0	-3	4.1	Melakukan pengawasan monitoring dan evaluasi pada pelaporan pengaduan serta melaksanakan	Jumlah kegiatan pengawasan, monitoring, evaluasi dan sosialisasi tata cara penyampaian pengaduan yang berlaku	Kepala Divisi Peraturan Perundung-Undangan dan Pembinaan Hukum	4 laporan	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10	https://drive.google.com/drive/folders/1n0fU2zEYFnWt12_kUHgBixjKGAmK/us?usp=sharing	
2.1	Kurangnya sistem kemanan	9	Jumlah kejadian	3	0	-3	13.1	Membentuk sistem kemanan IT, termasuk firewalls	Jumlah kegiatan pelaksanaan sistem kemanan	Ka Kanwil	90%	Sedang dilaksanakan	25%	dilakukan pada Periode B06	https://drive.google.com/drive/folders/1n0fU2zEYFnWt12_kUHgBixjKGAmK/us?usp=sharing	
1.2	Terjadinya kelincahan pelajar pemengang upaya peretasan	9	Jumlah kejadian	3	0	-3	1.2	Menyusun SOP yang jelas untuk pengelolaan akun media sosial	Jumlah SOP untuk pengelolaan akun media sosial	Ka Kanwil	1 Dokumen	Sedang dilaksanakan	50%	dilakukan pada Periode B06	https://drive.google.com/drive/folders/1n0fU2zEYFnWt12_kUHgBixjKGAmK/us?usp=sharing	
7.1	Kurangnya pengawasan dalam penyusunan anggaran	9	Jumlah perbaikan	3	0	-3	7.1	Mewajibkan pelaporan berkala tentang penyusunan anggaran	Jumlah pelaporan tentang penyusunan anggaran	Ka Kanwil	4 laporan	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10	https://drive.google.com/drive/folders/1n0fU2zEYFnWt12_kUHgBixjKGAmK/us?usp=sharing	
7.2	Kurangnya pengawasan yang tidak	9	Jumlah perbaikan	3	0	-3	7.2	Mengimplementasikan sistem tertutup untuk	Jumlah dokumentasi anggaran	Ka Kanwil	4 Dokumen	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada periode B06,B09,B10	https://drive.google.com/drive/folders/1n0fU2zEYFnWt12_kUHgBixjKGAmK/us?usp=sharing	
2.1	Keterbatasan kapasitas dan penyebarluasan	8	Jumlah	5	0	-2	2.1	Menerapkan manajemen data yang efektif untuk	Jumlah penyimpanan data yang telah di backup	Ka Kanwil	2 Dokumen	Sedang dilaksanakan	50%	dilakukan pada B09 dan B12		
13.1	Kurangnya kesadaran masyarakat terkait kriteria Kekayaan Intelektual	8	Jumlah	5	0	-5	13.1	Melakukan kampanye sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya Kekayaan Intelektual (KI)	Jumlah kegiatan sosialisasi terkait pentingnya Kekayaan Intelektual kepada Masyarakat	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	4 Kegiatan	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10		
3.6	Implementasi Kekayaan Intelektual belum menjangkau tempat/wilayah yang berpotensi menghasilkan produk	8	Jumlah	5	0	-5	3.6	Mengimplementasikan sistem roadshow dan workshop di daerah yang potensial dan memiliki pendaftaran KI	Jumlah kegiatan roadshow dan workshop di daerah yang potensial dan memiliki pendaftaran KI	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	4 laporan	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10	https://drive.google.com/drive/folders/1n0fU2zEYFnWt12_kUHgBixjKGAmK/us?usp=sharing	
23.1	Pengangkatan kasius pelenggaran KI yang tidak efektif	8	Jumlah	5	0	-5	23.1	Membentuk pelatihan khusus untuk penanganan kasius KI	Jumlah pelatihan yang diselenggarakan untuk penanganan kasius pelenggaran KI	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	2 Kegiatan	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada B06 dan B 09	https://drive.google.com/drive/folders/1n0fU2zEYFnWt12_kUHgBixjKGAmK/us?usp=sharing	
22.1	Beberapa satuan yang tidak atau belum	8	Jumlah produk hukum yang harus dilegalisasi	1	1	0	27.1	Menyelenggarakan distribusi lugas antar tim	Jumlah produk hukum yang telah dilegalisasi karena ketidaksesuaian dengan peraturan perundung-undangan	Kepala Divisi Peraturan Perundung-Undangan dan Pembinaan Hukum	1 Laporan	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada B06 dan B 09	https://drive.google.com/drive/folders/1n0fU2zEYFnWt12_kUHgBixjKGAmK/us?usp=sharing	
8.1	Kurangnya perbaikan tidak memenuhi standar dan Calon Penerima tidak hadir dalam undangan	6	Jumlah Tender pengadaan Barang dan Jasa	2	0	-2	8.1	Melakukan verifikasi ketidakhadiran penerima	Jumlah tender pengadaan barang dan jasa dari penyedia yang telah terverifikasi kualitasnya	Kabag TU Umum	1 Dokumen	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10	https://drive.google.com/drive/folders/1n0fU2zEYFnWt12_kUHgBixjKGAmK/us?usp=sharing	
9.1	Kendala pengajuan SPMI anataranya kurangnya indikasi dan lamanya waktu dikuasa	6	Jumlah pengajuan	1	3	2	9.1	Melakukan pelatihan tentang prosedur pengajuan SPM	Jumlah pelatihan terkait SOP Pengajuan SPM	Kabag TU Umum	1 Laporan	Sedang dilaksanakan	50%	pelaksanaan tentative periode		
11.1	Pelanggaran terhadap ketentuan dan kriteria	6	Jumlah kegiatan	1	3	2	11.1	Melakukan analisis kebutuhan yang mendalam sebelum menyusun anggaran	Jumlah rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam penyelesaian pengaduan	Ka Kanwil	1 Dokumen	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10	https://drive.google.com/drive/folders/1n0fU2zEYFnWt12_kUHgBixjKGAmK/us?usp=sharing	
12.1	Pengangkatan kasius pelenggaran KI yang tidak efektif	6	Jumlah kegiatan	1	3	2	20.1	Menerapkan sistem reward dan punishment untuk meningkatkan integritas	Jumlah kegiatan pelatihan keuangan dalam pengelolaan PNPB AHU	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	2 Laporan	Sedang dilaksanakan	50%	dilakukan pada B06 dan B 09	https://drive.google.com/drive/folders/1n0fU2zEYFnWt12_kUHgBixjKGAmK/us?usp=sharing	
21.1	Kurangnya akurasi anggaran khusus dan kurangnya biaya	6	Jumlah kegiatan	1	3	0	21.1	Melakukan analisis kebutuhan yang mendalam sebelum menyusun anggaran	Jumlah kegiatan yang di analisa sebelum melakukan penyusunan anggaran	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	3 Dokumen	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10	https://drive.google.com/drive/folders/1n0fU2zEYFnWt12_kUHgBixjKGAmK/us?usp=sharing	
22.1	Tingginya angka pelanggaran Kekayaan Intelektual yang disebabkan oleh ketidakdiaman masyarakat	6	Jumlah biaya tambahan untuk melaksanakan	3	3	0	22.1	Melakukan perbaikan biaya tambahan untuk memperbaiki pencarian dana	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan pada masyarakat untuk menekan tingginya presentase pelanggaran KI	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	2 Kegiatan	Sedang dilaksanakan	50%	dilakukan pada B06 dan B 09		
24.1	Kapasitas staf sistem yang tidak memenuhi standar dan menengah	6	Jumlah proses perbaikan KI	3	3	0	24.1	Menambah staf tambahan dan meningkatkan kapasitas sistem	Jumlah staf tambahan untuk mendukung perbaikan KI dan meningkatkan kapasitas sistem	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	1 Dokumen	Sedang dilaksanakan	50%	dilakukan 1 kali periode selanjutnya	https://drive.google.com/drive/folders/1n0fU2zEYFnWt12_kUHgBixjKGAmK/us?usp=sharing	
32.1	Kurangnya koordinasi antara Kanwil Kemukern dan pemerintahan daerah atau	6	Jumlah program peningkatan sadar hukum di	3	3	0	32.1	Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan pemerintah daerah	Jumlah rapat koordinasi rutin dengan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan binaan sadar hukum	Kepala Divisi Peraturan Perundung-Undangan dan Pembinaan Hukum	6 Kegiatan	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada periode B03,B06,B09,B10	https://drive.google.com/drive/folders/1n0fU2zEYFnWt12_kUHgBixjKGAmK/us?usp=sharing	
34.1	Risiko kolusi antara pejabat Kanwil dengan pihak eksternal (pemerintah daerah, lembaga pendidikan, koperasi, dan lainnya)	6	Jumlah kolusi dengan Pihak Eksternal	1	0	-1	34.1	Implementasi sistem pengawasan yang ketat	Jumlah sistem pengawasan yang telah diterapkan untuk menekan kemungkinan terjadinya praktik kolusi	Kepala Divisi Peraturan Perundung-Undangan dan Pembinaan Hukum	2 Laporan	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada B03 dan B12	https://drive.google.com/drive/folders/1n0fU2zEYFnWt12_kUHgBixjKGAmK/us?usp=sharing	

35,1	Kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan.	6	Jumlah pengalihan dana untuk keperluan	1	0	-1	35,1	Mempublikasikan laporan keuangan secara berkala	Jumlah laporan keuangan yang telah dipublikasikan ke publik	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	1 Laporan	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada Periode B12	https://drive.google.com/drive/folderview/1huO06VShLvgKo_xwvGKpbhVMP7jX3?usp=sharing
36,1	Budaya organisasi yang kurang mendukung integritas dan akuntabilitas	6	Jumlah dokumen palsu atau tidak	3	3	0	36,1	Menerapkan sistem reward and punishment untuk mendongr integritas	Jumlah pegawai pelayanan yang telah diberikan reward and punishment dalam upaya mempermudah pengesahan produk	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	12 Pegawai	Telah dilaksanakan	100%	Dilakukan setiap periode bulan berjalan	https://drive.google.com/drive/folderview/1sCfjX32zcmKQhotVenu
37,1	Budaya organisasi yang kurang mendukung integritas dan akuntabilitas	6	Jumlah dokumen palsu atau tidak	3	3	0	37,1	Menerapkan sistem reward and punishment untuk mendongr integritas	Jumlah pegawai pelayanan yang telah diberikan reward and punishment dalam upaya mempermudah pengesahan produk	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	12 Pegawai	Telah dilaksanakan	100%	Dilakukan setiap periode bulan berjalan	https://drive.google.com/drive/folderview/1sCfjX32zcmKQhotVenu
42,1	Lemahnya sistem pengawasani internal	6	Jumlah penyelenggaraan wewenang oleh	3	3	0	42,1	Melakukan audit internal secara berkala	Jumlah audit yang dilakukan secara berkala	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	1 Kegiatan	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada Periode B12	
43,1	Risiko pengelolaan anggaran yang tidak efektif dan kurangnya keterkaitan antara anggaran produk hukum, seperti pemborosan atau alokasi dana yang tidak tepat sasaran	6	Jumlah Anggaran yang Tidak Efisien	1	1	0	43,1	Memberikan pelatihan khusus tentang pengelolaan anggaran	Jumlah pelatihan terkait pengelolaan penganggaran	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	2 Kegiatan	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada setiap semester	https://drive.google.com/drive/folderview/1L1oT8lhZBj1MsGUQhbokkR9oxK86?usp=sharing
44,1	Kurangnya kapasitas staf dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan	6	Jumlah penyimpangan	3	3	0	44,1	Memberikan pelatihan khusus tentang pengelolaan keuangan	Jumlah pelatihan terkait pengelolaan keuangan	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum	2 Kegiatan	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada setiap semester	https://drive.google.com/drive/folderview/1xMBuK2SFx5HZY7CmT0
45,1	Proses administrasi keuangan yang rumit dan lambat	6	Jumlah penyimpangan	1	1	0	45,1	Menyederhanakan proses administrasi keuangan	Jumlah proses administrasi keuangan yang ditangani secara cepat	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan	2 Laporan	Sedang dilaksanakan	50%	Dilakukan pada periode bersangkutan	